

Bidang Fokus Penelitian: Sosial dan Humaniora

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS**



**JUDUL PENELITIAN:
ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN KEBIJAKAN PSBB PADA
PORTAL ONLINE PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

TIM PENGUSUL:

Badrudin Kurniawan	NIDN 0029048701
Tjitjik Rahaju	NIDN 0028047101
Meirinawati	NIDN 0021056804
Indah Prabawati	NIDN 0029077404
Galih Wahyu Pradana	NIDN 0020049001

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOVEMBER 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS**

Judul Penelitian : Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kebijakan PSBB pada Portal Online Pemerintah Kota Surabaya Surabaya

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 054/Illmu Administrasi

Bidang Fokus Penelitian : Kebijakan Publik

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Badrudin Kurniawan

b. NIDN : 0029048701

c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

d. Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Negara

e. Nomor HP : 08578460260

f. Alamat surel (e-mail) : badrudinkurniawan@unesa.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Tjitjik Rahaju

b. NIDN : 0028047101

c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Meirinawati

b. NIDN : 0021056804

c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Anggota Peneliti (3)

a. Nama Lengkap : Indah Prabawati

b. NIDN : 0029077404

c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Anggota Peneliti (4)

a. Nama Lengkap : Galih Wahyu Pradana

b. NIDN : 0020049001

c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Lama Penelitian Keseluruhan : 6 bulan

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 7.500.000,-

Biaya Penelitian :

- LPPM UNESA : Rp 7.500.000,-

- dana institusi mitra : Rp -



Surabaya, 20 November 2020

Ketua Peneliti,

(Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP.)
NIP 198704292015041001

Menyetujui,
Ketua LPPM

Prof. Dr. Darni, M.Hum.
NIP. 196509261990022001

RINGKASAN

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan ini diterapkan dalam skala provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah terlebih dahulu mengajukan kebijakan PSBB kepada menteri kesehatan. Apabila disetujui maka kebijakan tersebut bisa diterapkan. Salah satu kota yang menerapkan kebijakan tersebut yakni Kota Surabaya. Laman berita milik Pemerintah Kota Surabaya memberitakan bahwa pemerintah kota mematuhi apa yang diinstruksi oleh pemerintah propinsi yakni menerapkan PSBB. Pemberitaan yang dilakukan pemerintah kota merupakan bentuk komunikasi kebijakan yang persuasif. Komunikasi melalui media daring ini mampu membangun opini publik. Dalam pemberitaan awal PSBB, belum nampak pemberitaan mengenai bantuan terhadap para perantau dan pemantau PSBB di kawasan industri. Beranjak dari hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kebijakan PSBB pada Portal Online Pemerintah Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis wacana kritis pemberitaan kebijakan PSBB pada portal *online* Pemerintah Kota Surabaya. Data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya menggunakan strategi tekstual untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya bekerja keras dan professional dalam mengatasi Pandemi Covid-19 selama periode pertama PSBB. Meskipun juga ditemukan bahwa terdapat unsur penting PSBB yang tidak mendapatkan porsi pemberitaan yang cukup. Pemberitaan yang dimaksud adalah pengawasan penerapan protokol Covid-19 pada industri-industri yang berada di Kota Surabaya. Wartawan menilai pemberitaan tersebut kurang menguntungkan pemerintah kota. Padahal pemberitaan pengawasan juga menunjukkan bahwa pemerintah memastikan protokol Covid-19 selama PSBB bisa diterapkan dengan baik. Selain itu, melalui akun media sosial resmi pemerintah kota, warga juga memberikan perhatian atas pelanggaran-pelanggaran protokol Covid-19 yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa wilayah di Surabaya. Dalam media sosial tersebut, warga juga menagih bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Pembatasan Sosial Berskala Besar, Komunikasi Kebijakan, Analisis Wacana Kritis

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan karunia-NYA, akhirnya Laporan Penelitian Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kebijakan PSBB pada Portal Online Pemerintah Kota Surabaya bisa kami selesaikan. Laporan penelitian ini disusun tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unesa yang memberikan dana penelitian hingga setiap kegiatan penelitian mampu dilakukan dengan optimal
2. Jurusan Administrasi Publik, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan berbagai aktifitas penelitian yang kadang juga cukup mempengaruhi aktifitas belajar mengajar di kelas
3. Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu tersusunnya laporan ini.

Penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan laporan penelitian ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Surabaya, 1 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	3
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	5
BAB 4. METODE PENELITIAN	6
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN	8
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	35
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	36
DAFTAR PUSTAKA	ix
LAMPIRAN	xi

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 5.1	Jumlah Artikel Berita Per Hari Selama Kebijakan PSBB Periode Pertama Kota Surabaya	11
Tabel 5.2	Kategori Artikel Berita Selama Kebijakan PSBB Periode Pertama Kota Surabaya	12

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 2.1	<i>Research Roadmap</i> Komunikasi Kebijakan Publik	4
Gambar 4.1	Alur Penelitian	6
Gambar 5.1	Struktur Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya	9
Gambar 5.2	Akun Resmi Instagram Pemerintah Kota Surabaya	28
Gambar 5.3	Komentar pada Postingan 28 April 2020 dengan “like” Terbanyak	29
Gambar 5.4	Komentar pada Postingan 1 Mei 2020 dengan “like” Terbanyak	30
Gambar 5.5	Komentar pada Postingan 5 Mei 2020 dengan “like” Terbanyak	30
Gambar 5.6	Komentar pada Postingan 6 Mei 2020 dengan “like” Terbanyak (Postingan Pertama)	31
Gambar 5.7	Komentar pada Postingan 6 Mei 2020 dengan “like” Terbanyak (Postingan Kedua)	32
Gambar 5.8	Komentar pada Postingan 7 Mei 2020 dengan “like” Terbanyak	33
Gambar 5.9	Komentar pada Postingan 10 Mei 2020 dengan “like” Terbanyak	33
Gambar 5.10	Komentar pada Postingan 11 Mei 2020 dengan “like” Terbanyak	34

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Instrumen Penelitian	xi
Personalia Tenaga Peneliti beserta Kualifikasi	xiii
Draft Artikel untuk Publikasi Ilmiah	xiv
Lembar Penilaian dari Reviewer	xx

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebelum kebijakan ini diterapkan di daerah-daerah di Indonesia, pemerintah daerah mengusulkan PSBB terlebih dahulu kepada Menteri Kesehatan. Pemerintah Kota Surabaya, dengan jumlah warga terinfeksi paling banyak di Propinsi Jawa Timur juga mengajukan dan telah mendapatkan persetujuan penerapan PSBB. Sebelumnya, banyak media massa yang mengulas tentang sikap Pemkot Surabaya yang tidak segera mengajukan PSBB meskipun kota ini memiliki jumlah kasus Covid-19 terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Berikut beberapa ulasan laman berita daring terkait hal tersebut.

1. Tanggal 10 April 2020: Judul “Ketimbang PSBB di Surabaya, Ini Jurus Risma Tangkal Covid-19”. Dalam liputan tersebut Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan bahwa PSBB atau karantina wilayah justru membuat kacau. Menurutnya yang paling penting adalah disiplin jaga jarak, pakai masker, dan selalu menjaga kebersihan [1].
2. Tanggal 14 April 2020: Judul “DPRD Minta Pemkot Surabaya Segera Terapkan PSBB”. Dalam liputan tersebut Ibnu Shobir, anggota Komisi D DPRD mengatakan Pemkot Surabaya seharusnya segera memberlakukan PSBB karena angka kasus positif Covid-19 terus bertambah. Jika PSBB diterapkan perlu ada bantuan untuk MBR maupun MBR [2].
3. Tanggal 21 April 2020: Judul “DPRD Ragu dengan Kekuatan Anggaran untuk Penerapan PSBB di Surabaya. Dalam liputan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra A.H. Thony, mempertanyakan kecukupan anggaran untuk pengadaan sembako bagi non-Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebelumnya Pemkor menetapkan alokasi anggaran untuk MBR sebesar Rp. 161 miliar [3].

Namun pemberitaan di laman berita yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya yakni <https://surabaya.go.id/id/berita>, tanggal 19 April 2020 menyebutkan bahwa Walikota Surabaya Tri Rismaharini *manut* keputusan gubernur [4]. Setelah memberlakukan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-

19) di Kota Surabaya, laman berita yang sama mengulas berbagai kegiatan pemerintah kota dalam rangka persiapan pelaksanaan PSBB. PSBB di kota ini dilaksanakan mulai tanggal 28 April 2020 hingga 11 Mei 2020 [5].

Dari beberapa ulasan berita pada laman <https://surabaya.go.id/id/berita> belum nampak ulasan tentang persiapan bantuan kepada warga perantauan dan pemantauan langsung ke industri-industri yang ada di Surabaya. Padahal sebelumnya dikabarkan bahwa ebanyak 4.242 pekerja rumah hiburan umum (RHU) terkena PHK. Sebelumnya, rapat koordinasi Komisi D dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya menyebutkan baru ada delapan perusahaan yang lapor telah merumahkan atau PHK 685 karyawan [6]. Pemantauan terhadap industri-industri di Kota Surabaya juga penting untuk menjamin kepatuhan mereka terhadap kebijakan PSBB. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, tahun 2014 terdapat 816 industri sedang dan besar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 108.803 orang. Berdasarkan kondisi ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kebijakan PSBB pada Portal Online Pemerintah Kota Surabaya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi kebijakan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Beberapa ilmuwan yang mengatakan hal serupa meliputi George Edward III, Donald Van Meter dan Carl Van Horn, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn. Baik menurut Van Meter dan Van Horn dan Hogwood dan Gunn bahwa jenis komunikasi yang dimaksud merupakan komunikasi kepada organisasi [7]. Komunikasi adalah perekat organisasi dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim serta terbentuknya sinergi [8]. Kedua ilmuwan ini lebih mengutamakan komunikasi antara pembuat kebijakan dengan organisasi pelaksana dan komunikasi yang terjadi di dalam organisasi pelaksana tersebut. Berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Edward III, komunikasi dalam kebijakan merupakan komunikasi baik antara organisasi maupun komunikasi kepada publik/masyarakat [7]. Edward III meyakini bahwa keberhasilan kebijakan juga dipengaruhi oleh komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Edward III, terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi dalam kebijakan. Tiga indikator tersebut meliputi transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi [9].

1. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula karena informasi tidak terdistorsi
2. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
3. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

Penelitian komunikasi kebijakan di Indonesia telah banyak dilakukan. Studi ini banyak membahas mengenai indikator keberhasilan yang disampaikan oleh Edward III [10] [11] [9] [12]. Bentuk komunikasi dengan transmisi yang baik, kejelasan dan konsistensi informasi perlu juga didukung kondisi sosial masyarakat. Bentuk komunikasi yang berbasis pada kondisi sosial masyarakat akan mewujudkan keberhasilan komunikasi kebijakan.

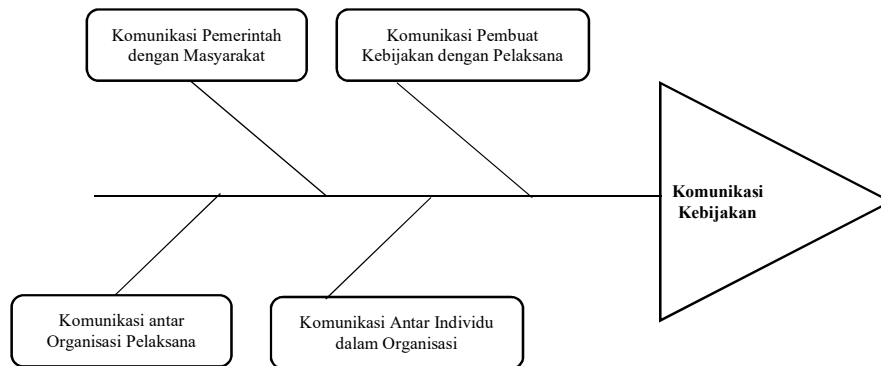
Di era Revolusi Industri 4.0, komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan secara daring. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki laman resmi yang memuat banyak informasi. Salah satu konten dalam laman resmi tersebut adalah pemberitaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemberitaan ini

juga merupakan bentuk komunikasi kebijakan yang memiliki sifat persuasif karena mampu memberikan pengaruh terhadap opini publik. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Anderson dalam Sidauruk mengatakan bahwa *mass communication media may play an important role in shaping public opinion toward an agency by revealing and publicizing its actions, favorably or unfavorably* [12].

Studi komunikasi kebijakan khususnya pemberitaan kebijakan melalui laman resmi pemerintah perlu untuk dilakukan. Pemerintah mampu membangun opini publik sesuai dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu perlu sikap kritis untuk melakukan analisa terhadap pemberitaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini pendekatan Analisa Wacana Kritis penting untuk diadopsi dalam menganalisa pemberitaan kebijakan. Dengan pendekatan ini, peneliti mampu menguak kepentingan pemerintah melalui teks dan konteks pemberitaan kebijakan via daring.

Penelitian ini merupakan bagian dari serangkaian upaya peneliti untuk memahami lebih baik mengenai komunikasi kebijakan publik. Dalam *research roadmap*, peneliti menempatkan studi ini pada komunikasi kebijakan antara pemerintah dengan publik/masyarakat. Selain itu, komunikasi kebijakan juga dilakukan antara pembuat kebijakan dengan organisasi pelaksana kebijakan, komunikasi antar organisasi pelaksana dan komunikasi antar individu yang ada dalam organisasi pelaksana tersebut. Berikut ini adalah *research roadmap* peneliti yang ditunjukkan dalam bentuk *fishbone*.

Gambar 2.1 *Research Roadmap* Komunikasi Kebijakan Publik



Sumber: Olahan Peneliti

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis wacana kritis pemberitaan kebijakan PSBB pada portal *online* Pemerintah Kota Surabaya? Tujuannya yakni menjawab rumusan masalah tersebut.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena belum banyak penelitian yang menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk pemberitaan kebijakan dari laman berita daring milik pemerintah. Padahal pemberitaan yang dilakukan pemerintah juga mempengaruhi opini publik di masyarakat. Penelitian ini akan memberikan lebih banyak manfaat dalam hal (1) peningkatan pemahaman masyarakat terhadap strategi komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (2) peningkatan kualitas komunikasi kebijakan antara masyarakat dan pemerintah.

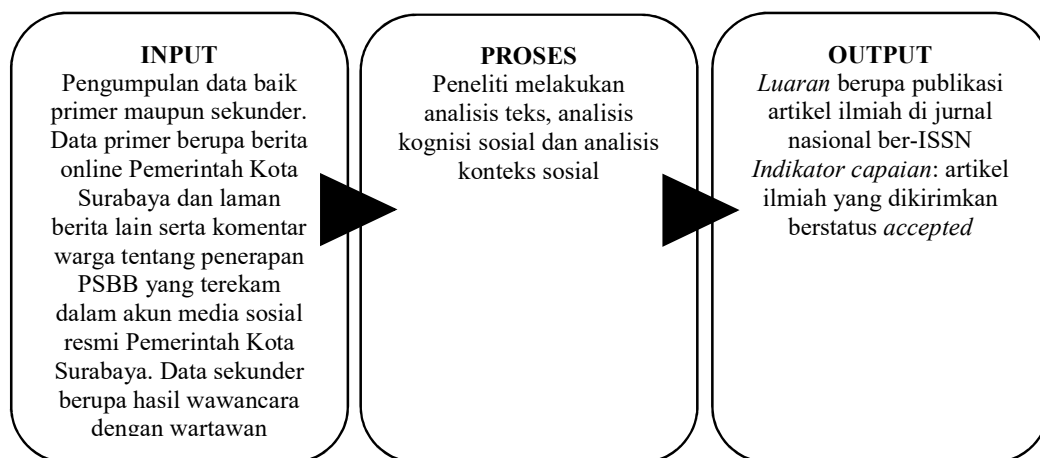
BAB 4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data baik primer maupun sekunder [13]. Penelitian ini dilakukan berlandaskan paradigma kritis. Dalam paradigma ini media dipandang sebagai alat kelompok dominan untuk memanipulasi dan mengukuhkan kehadirannya sembari memarginalkan kelompok yang tidak dominan. Wartawan yang bekerja dalam suatu sistem produksi berita bukanlah otonomi, bukan pula bagian dari suatu sistem yang stabil tetapi merupakan praktek ketidakseimbangan dan dominasi [14].

Dalam bukunya Eriyanto [14] yang bertajuk Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media digambarkan kerangka analisis wacana kritis van Dijk. Dalam kerangka tersebut setidaknya ada tiga aspek penting yang saling berkaitan dalam membentuk makna wacana dalam pemberitaan online penerapan kebijakan PSBB oleh Pemerintah Kota Surabaya. Ketiga aspek tersebut meliputi teks, kognisi sosial dan analisis sosial. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar penentuan fokus analisis wacana kritis. Berikut adalah fokus dalam penelitian ini:

1. Strategi wacana dan tekstual yang digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan PSBB di Kota Surabaya
2. Kognisi wartawan untuk laman <https://surabaya.go.id/id/berita> dalam memahami pelaksanaan kebijakan PSBB di Kota Surabaya
3. Wacana pelaksanaan kebijakan PSBB yang berkembang dalam masyarakat Kota Surabaya.

Gambar 4.1 Alur Penelitian



Sumber: olahan peneliti

Proses penelitian dilakukan mulai dari pengumpulan data hingga menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan wartawan portal berita daring milik Pemerintah Kota Surabaya. Data sekunder berupa berita online Pemerintah Kota Surabaya dan laman berita lain serta komentar warga tentang penerapan PSBB yang terekam dalam akun media sosial resmi Pemerintah Kota Surabaya. Data-data tersebut kemudian dianalisis. Teknik analisis meliputi Analisis teks dilakukan dengan identifikasi struktur teks dan strategi wacana. Kemudian analisis kognisi sosial dilakukan untuk mengetahui keberpihakan dari wartawan terhadap isu tersebut. Selanjutnya analisis konteks sosial tentang wacana-wacana yang berkembang di masyarakat. Akhirnya penelitian ini akan menghasilkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di jurnal nasional yang ber-ISSN.

Dalam penelitian ini, masing-masing anggota peneliti mendapatkan tugas yang berbeda. Ketua peneliti dan semua anggota peneliti melakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Namun khusus untuk wawancara dilakukan oleh ketua peneliti dan anggota peneliti 4. Anggota peneliti 1 hingga 3 membantu menyusun instrumen wawancara. Dalam tahap analisis data, ketua peneliti dan peneliti 4 melakukan analisis teks dan analisis kognisi sosial. Sedangkan Peneliti 1 hingga 3 melakukan analisis konteks sosial. Hasil dari ketiga bentuk analisis itu kemudian digunakan untuk menyusun artikel ilmiah. Artikel ilmiah dilakukan oleh ketua peneliti dan peneliti 4. Sedangkan peneliti 1 hingga 3 membantu berkomunikasi dengan pihak pengelola jurnal.

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya

Sejarah Singkat Organisasi

Pada awalnya bagian Humas dan protokol merupakan salah satu bagian dari Sekretarian Daerah Pemerintah kota Surabaya. Selanjutnya bagian ini menyatu dalam dinas informasi dan komunikasi (Infokom) kota surabaya. Namun bagian ini kemudian menjadi dua, yaitu bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan Badan Pusat Penelitian Teknologi Komunikasi (Bappetikom) pada permulaan tahun 2006.

Kemudian pada tahun 2008, bagian protokol digabungkan dengan bagian urusan sekretariat daerah kota surabaya dan bagian Humas berdiri sendiri di bawah dan tanggung jawab kepada sekretariat daerah melalui asisten kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah kota Surabaya, sampai sekarang. Bagian Hubungan masyarakat terdiri dari tiga sub. Bagian yaitu sub. Bagian layanan informasi, sub. Bagian liputan Berita dan Pers, dan Sub. Bagian dokumentasi dan Pelapor.

Visi dan Misi Bagian Humas

Visi bagian Humas sekretariat daerah Surabaya adalah;

“Terwujudnya pelayanan informasi yang cepat, tepat, transparan dan objektif”,

dengan substansi sebagai berikut:

Tercapainya pemahaman yang sama antara pemkot dan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang di sosialisasikan kepada masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota surabaya.

Misi bagian Humas Sekretariat daerah Kota Surabaya sebagai berikut:

Meningkatkan pelayanan informasi dan menampung aspirasi publik melalui pemanfaatan arus informasi dan komunikasi.

1. Meningkatkan kualitas arus informasi secara cepat, tepat, transparan, dan objektif.
2. Mendorong terwujudnya pemahaman informasi dan komunikasi antara pemkot dengan pers, masyarakat dan lembaga lainnya.
3. Meningkatkan hubungan yang harmonis antara pemkot, masyarakat dan pers serta anggota lembaga lainnya.
4. Mengembangkan SDM di bidang kehumasan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Tujuan dan Sasaran Bagian Humas

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi bagian Humas secretariat daerah kota Surabaya, tujuan yang hendak dicapai bagian Humas meliputi:

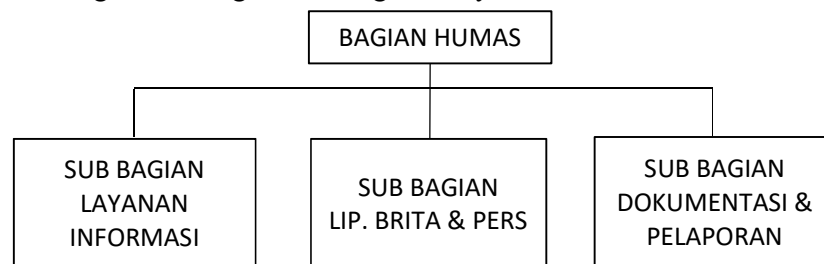
1. Terwujudnya pelayanan informasi yang prima dan berkualitas
2. Terwujudnya komunikasi yang harmonis antara pemkot dan masyarakat serta lembaga lainnya.
3. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
4. Meningkatkan penyaluran informasi dan aspirasi publik.
5. Terciptanya majalah pemerintah daerah.
6. Terciptanya citra yang positif bagi Pemkot Surabaya.

Sasaran yang ditetapkan sebagai berikut:

1. meningkatkan sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi publik
2. meningkatkan arus transformasi informasi dan ILM melalui media yang tersedia.
3. Membangun dan mengembangkan komunikasi antara Pmkot, Pers, masyarakat dan lembaga lainnya.
4. Memanfaatkan teknologi informasi (IT) untuk pelayanan informasi terhadap media.
5. Meningkatkan sosialisasi dan publikasi melalui media.
6. Meningkatkan dan mengembangkan SDM di bidang kehumasan.

Struktur Organisasi Bagian Humas

Gambar 5.1
Struktur Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya



Sumber: olahan peneliti

Program Masing-masing Sub-Bagian

Guna mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara Pemkot Surabaya dengan pers dan masyarakat serta lembaga lainnya, maka bagian Humas memiliki tugas melaksanakan hubungan masyarakat di bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan tupoksi yang dibiayai oleh APBD meliputi :

1. Program Peningkatan Layanan Informasi
Pelayanan Informasi melalui Event kegiatan:

- a. Forum Komunikasi kehumasan (Media Gathering)
- b. Jump pers
- c. Layanan informasi Pemerintah Kota Surabaya (LIPS)
- d. Lomba Foto HJKS dan Hari Pahlawan, Lomba Photo Instagram
- e. Media Sosial (Twitter, FB, Instagram, Web, Blog, Youtube)
- f. Pengembangan wawasan bidang kehumasan
- g. Pengembangan pers dan jurnalistik
- h. Ulasan berita media cetak Pemerintah kota Suraaya (Executive Summary)
- i. Lomba Video Singkat.

2. Program peningkatan Peliputan

Guna menukung kegiatan sosialisasi program dan kebijakan pemerintah kota Surabaya, maka dilakukan kegiatan peliputan melalui:

- a. Melakukan kliping pemberitaan tentang Pemkot
- b. Hunting data dan klarifikasi berita
- c. Kegiatan peliputan pemkot Surabaya
- d. Pembuatan CD spot ILM di media TV
- e. Pembuatn ILM di media cetak/elektronik

3. Program peningkatan dokumentasi dan pelaporan:

- a. Mengelola data dokumentasi:
 - penerbitan majalah Gapura
 - Peningkatan akseibilitas dokumentasi dan pelapor
 - Memuat, menghimpun, dan mendokumentasikan naskah pidato wali kota/ sambutan wali kota
 - Penggandaan CD kegiatan Walikota dan dokumentas foto
 - Mendokumentasikan kegiatan emmerintah kota ala bentuk audio visual dan foto
 - Mencetak buu panduan hari jai kota Surabaya
- b. Pembuatan banner dan poster, pamflet, brosur dan stiker
- c. Menokumentasikan kampung wisata, kampung produktif, kampung urban farming di Surabaya dalam bentk film
- d. Mengelola isi website www.humas.surabaya.co.id

B. Strategi Wacana yang Digunakan untuk Menggambarkan Pelaksanaan Kebijakan PSBB di Kota Surabaya

Tabel 5.1 Jumlah Artikel Berita Per Hari Selama Kebijakan PSBB
Periode Pertama Kota Surabaya

Hari ke-	Tanggal Berita	Jumlah Artikel	Hari ke-	Tanggal Berita	Jumlah Artikel
1	Selasa, 28 April 2020	5	9	Rabu, 06 Mei 2020	3
2	Rabu, 29 April 2020	1	10	Kamis, 07 Mei 2020	3
3	Kamis, 30 April 2020	2	11	Jum'at, 08 Mei 2020	2
4	Jum'at, 01 Mei 2020	3	12	Sabtu, 09 Mei 2020	2
5	Sabtu, 02 Mei 2020	2	13	Minggu, 10 Mei 2020	3
6	Minggu, 03 Mei 2020	1	14	Senin, 11 Mei 2020	2
7	Senin, 04 Mei 2020	2	15	Selasa, 12 Mei 2020	3
8	Selasa, 05 Mei 2020	3			
	Total	19			18

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Tabel di atas menunjukkan jumlah artikel yang diterbitkan di portal Surabaya.go.id dengan tema seputar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya. Dari tabulasi data tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa jumlah pemberitaan yang diterbitkan dari periode 28 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020 dengan tema PSBB adalah sebanyak 37 artikel. Artikel terbanyak diterbitkan pada tanggal 28 April 2020 dengan jumlah 5 artikel yang terbit pada hari itu, selebihnya rata-rata 2 sampai 3 artikel diterbitkan secara rutin dalam kurun waktu 15 hari dari 28 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas penerbitan artikel pada portal Surabaya.go.id cukup intens dengan rerata 2,47 artikel per-hari yang *publish*.

Berdasarkan bentuk kegiatan dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) artikel yang diterbitkan oleh portal Surabaya.go.id dapat dikategorikan kedalam 6 tema diantaranya tema pertama testing, tracing dan treatment, tema kedua yaitu bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat, tema ketiga tentang insentif kepada pelaku usaha, tema keempat tentang pemantauan dan evaluasi, tema kelima tentang lain-lain yang berkaitan dengan PSBB, dan tema keenam yang terakhir yaitu tentang lain-lain yang tidak terkait dengan PSBB. Secara lebih detail artikel yang terbagi kedalam enam tema tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Kategori Artikel Berita Selama Kebijakan PSBB Periode Pertama
Kota Surabaya

No	Bentuk Kegiatan dalam PSBB	Jumlah Artikel	Judul Artikel
1	Testing, Tracing and Treatment	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dianggap Lamban Tangani Kasus Covid-19 PT HM Sampoerna, Pemkot Nilai Gubernur Keliru 2. Hasil Rapid Test Ada Pedagang Dinyatakan Reaktif, Pasar Simo dan Simo Gunung Tidak Dioperasionalkan Selama 14 Hari 3. Hari Ini, Pedagang Pasar Simo dan Simo Gunung Dilakukan Rapid Test 4. Pemkot Surabaya Fasilitasi 1.083 Orang Tes Swab Gratis 5. Ruang Isolasi di Rumah Sakit Overload, Begini Penjelasan Pemkot Surabaya 6. Seribu Cara Gugus Tugas Surabaya Merayu OTG Supaya Mau Berobat 7. Rumah Sakit Surabaya Jadi Rujukan Seluruh Jatim, IDI-PERSI Segera Atur Regulasinya 8. Pemkot Terapkan Metode Sarang Tawon Untuk Cegah Penularan Covid-19 Di Perkampungan
2	Bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemkot Terima Bantuan 10 Ribu Paket Sembako dari Presiden Ri Untuk Disalurkan ke Warga 2. Mulai besok, Pemkot Surabaya Bakal Distribusikan Bantuan Sembako ke Warga 3. Bantuan Sembako ke Warga Terdampak Covid-19 di Surabaya Mulai Disalurkan 4. Keterbukaan Informasi Publik, Daftar Penerima Bantuan Covid-19 Di Surabaya Bisa Dicek di Kelurahan
3	Insentif kepada pelaku usaha	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemkot Surabaya Ajak UMKM Kolaborasi Bersama Tangani Covid-19
4	Pemantauan dan Evaluasi	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hari Pertama Diterapkan PSBB, Pemkot Lakukan Evaluasi

			<ol style="list-style-type: none"> 2. PSBB Terus Dievaluasi, Akses Masuk Kota Surabaya Relatif Lancar 3. PSBB Surabaya Mulai Penindakan, Pemkot Keliling ke Fasum Hingga Mall 4. Selama Sepekan PSBB, Ini Evaluasi Pemkot Surabaya 5. Putus Mata Rantai Covid-19, Begini Upaya Pemkot Surabaya Tangani Pasar 6. Pelanggar PSBB Tahap Kedua Bakal Diberi Sanksi Lebih Tegas 7. Wali Kota Risma Imbau Warganya Taat Protokol Selama PSBB Tahap Kedua
5	Lain-lain (terkait PSBB)	14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemkot Surabaya Sampaikan Duka Cita Atas Meninggalnya Pejuang Medis yang Menangani Covid-19 2. Beri Dukungan para Dokter, Wali Kota Risma Kunjungi RSUD Dr Sowandhie 3. Demi Keamanan dan Keselamatan Warga, Wali Kota Risma Keluarkan SE Peningkatan Kewaspadaan 4. Beri Dukungan, Wali Kota Risma Selalu Hubungi OTG, ODP, dan PDP 5. Wali Kota Risma Hitung Ada 16 Klaster di Surabaya 6. Surabaya Terapkan PSBB, Terminal Purabaya dan Tow Hentikan Operasional Bus AKDP Dan AKAP 7. Pemkot Surabaya Hapuskan Denda PBB di Tengah Pandemi Covid-19 8. Tiga Purnawirawan Jenderal yang Diterjunksi BNPB Puji Penanganan Covid-19 Di Surabaya 9. Bantuan Tenaga Medis, Keluarga Buddhayana Serahkan Ribuan APD ke Pemkot Surabaya

			<ul style="list-style-type: none"> 10. Wali Kota Risma Tunggu Bantuan Reagen PCR dari Kemenkes 11. Kementerian Kesehatan Bantu Pemkot Surabaya 4 Ribu Alat Tes Swab 12. Hingga Hari Ini Pemkot Surabaya Terima Bantuan 4000 Reagen Dan 15 Ribu APD dari Kemenkes 13. Sudah Diperiksa Dinkes, Perempuan yang Mengaku Kena Semprot Disinfektan Ternyata Mengidap Penyakit Herpes 14. Keren! Staf Disbudpar Surabaya Ciptakan Lagu Bersatu Melawan Virus Corona
6	Tidak terkait PSBB	3	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penuhi Janji Nazar, Wali Kota Risma 'Ngepel' SDN Ketabang I/288 Surabaya 2. Sah! Benteng Kedung Cowek Ditetapkan Sebagai Bangunan Cagar Budaya 3. Pemkot Imbau Warga Waspada Modus Penipuan Mengatasnamakan Pejabat

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Tabel di atas menunjukkan rincian artikel yang terpublish di portal surabaya.go.id berdasarkan tema dan bentuk kegiatan dalam PSBB. Artikel yang paling banyak terpublish merupakan artikel dengan tema lain-lain terkait PSBB, dengan jumlah 14 artikel. Disusul oleh artikel dengan tema testing, tracing, and treatment yang berada di posisi kedua terbanyak dengan jumlah 8 artikel. Selanjutnya ada artikel dengan tema pemantauan dan evaluasi sejumlah 7 artikel, disusul artikel dengan tema bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat sejumlah 4 artikel dan tema tidak terkait PSBB sebanyak 3 artikel dan tema terakhir yaitu insentif terhadap pelaku usaha sebanyak 1 artikel.

Tema pertama yang akan dibahas adalah terkait kegiatan testing, tracing, and treatment dimana pada tema ini terdapat 8 artikel yang dipublish di portal Surabaya.go.id pada periode 2 Mei 2020 sampai dengan 12 Mei 2020. Berita pertama yang terbit pada tema ini adalah tentang Kasus Covid-19 yang terjadi di PT HM Sampoerna dimana terdapat komentar dari pihak Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur Jawa Timur bahwa Pemerintah Kota Surabaya dinilai lamban dalam menangani kasus tersebut. Dalam portal tersebut Pemerintah Kota Surabaya mengklarifikasi pernyataan dari Gubernur Provinsi

Jawa Timur mengenai terlambatnya penanganan penyebaran Covid-19 di PT Sampoerna. Dalam portal tersebut juga diklarifikasi bahwa Pemerintah Kota Surabaya selalu serius dan cepat dalam mendapatkan semua informasi yang berkembang terkait dengan penyebaran Covid-19. Kemudian pada tanggal 4 Mei 2020 portal Surabaya.go.id memberitakan tentang ruang isolasi di Rumah Sakit yang mengalami kelebihan kapasitas. Dalam artikel tersebut Pemerintah Kota Surabaya melalui Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya menjelaskan bahwa kelebihan kapasitas yang terjadi pada ruang isolasi di Rumah Sakit diakibatkan karena ruang isolasi tersebut tidak hanya menangani pasien confirm Covid-19 namun juga Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Pemerintah Kota Surabaya juga berupaya maksimal untuk menambah jumlah bed di ruang isolasi pada Rumah Sakit milik Pemerintah Kota. Bahkan Rumah Sakit milik swasta juga sedang melakukan hal yang sama dengan rencana penambahan bed.

Pada tanggal 7 Mei 2020, portal surabaya.go.id menerbitkan artikel tentang penutupan pasar Simo dan Simo Gunung selama 14 hari karena terdapat salah satu pedagang pasar yang hasil Rapid Testnya dinyatakan positif. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dinas Sosial Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya, PD Pasar Surya, Camat Sawahan dan Camat Sukomanunggal. Tujuan dari penutupan dua pasar tersebut adalah untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Berita selanjutnya terkait tema testing, tracing, and treatment terbit di hari yang sama yaitu pada tanggal 7 Mei 2020 tentang pelaksanaan Rapid Test pada pedagang pasar Simo dan Simo Gunung. Berita ini merupakan berita lanjutan dari artikel sebelumnya, dimana pada pemberitaan ini dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya melakukan melakukan rapid test terhadap pedagang pasar Simo dan Simo Gunung demi menjaga dan melindungi pedagang dan pembeli. Kedua pasar tersebut dilakukan rapid test lantaran beberapa waktu sebelumnya ditemukan salah satu pedagang meninggal terkonfirmasi positif covid-19 dan sebelumnya sempat beraktivitas di pasar tersebut.

Pemberitaan selanjutnya tentang tema testing, tracing, and treatment diterbitkan setelah dua hari dari pemberitaan pelaksanaan rapid test kepada pedagang di pasar Simo dan Simo Gunung. Pada tanggal 9 Mei 2020, portal surabaya.go.id menerbitkan berita tentang fasilitas test swab gratis yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Swab test gratis tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memastikan apakah warga positif terkena covid-19 atau tidak. Upaya yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Surabaya ternyata tidak berhenti pada pelaksanaan rapid test dan swab test saja, namun ada upaya yang dilakukan untuk merayu beberapa warga yang terkonfirmasi sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG) untuk melakukan perobatan. Upaya tersebut dijabarkan dalam artikel yang terbit pada tanggal 11 Mei 2020 dengan judul seribu cara Gugus Tugas Surabaya Merayu OTG supaya mau berobat. Hal ini dikarenakan tidak semua warga berkenan untuk berobat ke Rumah Sakit meskipun hasil dari pemeriksaan via swab test menyatakan bahwa yang bersangkutan telah terkonfirmasi Covid-19. Di hari yang sama, portal surabaya.go.id juga menerbitkan berita tentang regulasi yang perlu ditetapkan terkait rujukan pasien Covid-19 dari berbagai kota di Provinsi Jawa Timur yang ditujukan ke Rumah Sakit Kota Surabaya. Berita ini diterbitkan karena menurut Pemerintah Kota Surabaya tidak semua pasien covid-19 di Provinsi Jawa Timur perlu dirujuk ke Rumah Sakit di Surabaya.

Berita terakhir terkait tema testing, tracing, and treatment terbit pada tanggal 12 Mei 2020 tentang metode yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di kawasan perkampungan. Metode yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk meminimalisir penyebaran yang semakin massive pada kawasan perkampungan adalah metode sarang tawon. Metode ini ditekankan pada pelaksanaan rapid test secara masal di kawasan yang terindikasi dan terkonfirmasi terpapar oleh Covid-19. Sehingga dengan metode ini diharapkan proses screening dan tracing dapat dilakukan secara efektif untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dari delapan berita yang telah diterbitkan di atas, penulis mencoba untuk melakukan analisis terkait makna teks yang terdapat pada masing-masing berita yang dipublish beserta leksikon atau pilihan kata yang diambil dalam penyusunan teks pemberitaan. Secara teks kedelapan berita yang dipublish dengan tema testing, tracing and treatment lebih terfokus pada bagaimana upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pencegahan serta penanganan Covid-19 secara umum. Namun dalam berita yang dipublish juga terdapat beberapa klarifikasi dan pembelaan terhadap tuduhan dan anggapan terkait kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani Covid-19 yang dirasa kurang maksimal. Beberapa pemberitaan terkait klarifikasi pada tema pertama ini dapat ditemui pada pemberitaan kasus PT HM Sampoerna, ruang isolasi di Rumah Sakit yang overload, dan pemberitaan tentang rumah sakit di Surabaya yang menjadi rujukan bagi bagi seluruh pasien di Jawa Timur. Secara makna teks, pemberitaan terkait klarifikasi tersebut sebenarnya tidak terlalu penting bagi masyarakat karena pada kondisi pandemi dimana masyarakat mengalami kebingungan, upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam

memberikan informasi yang edukatif terkait Covid-19 lebih dibutuhkan. Klarifikasi dapat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan serta upaya secara langsung dari Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani Covid-19 secara lebih sigap.

Dilihat dari leksikon atau pilihan kata yang diambil, kedelapan pemberitaan pada tema pertama ini lebih banyak menggunakan leksikon atau pilihan kata yang berhubungan dengan dunia medis seperti “epidemiologi”, “rapid test”, dan “pandemi”. Sementara beberapa kata umum atau istilah tertentu juga digunakan untuk menghidupkan bacaan seperti “berkirim surat”, “bersusah payah”, serta “membantah”. Terdapat pula beberapa metafora (ungkapan, pepatah, peribahasa) antara lain “tanpa biaya sepeserpun”, “pedagang tumpahan pasar”, “memutus mata rantai penyebaran”, “turun untuk menyadarkan”, serta “mengapresiasi setinggi-tingginya”. Leksikon dan metafora yang terdapat pada pemberitaan di tema pertama masih dirasa pantas dan cukup memberikan warna serta makna yang tepat sehingga pesan dari teks yang ada dapat tersampaikan dengan baik.

Tema kedua yang dibahas adalah bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat, dimana pada tema ini terdapat 4 artikel yang dipublish di portal surabaya.go.id. pada periode 30 April 2020 sampai dengan 7 Mei 2020. Berita pertama yang terbit pada tema ini adalah tentang Pemerintah Kota Surabaya yang menerima bantuan 10.000 paket sembako dari Presiden RI untuk disalurkan ke warga Kota Surabaya. Bantuan tersebut diterima melalui Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, pada saat berita ini diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya masih menunggu verifikasi data masyarakat berpenghasilan rendah yang diajukan ke Kementerian Sosial untuk daftar penerima bantuan sosial tunai serta penyaluran kepada warga Surabaya yang terdampak Covid-19. Kemudian pemberitaan dilanjutkan dengan judul distribusi bantuan sembako kepada warga, dimana dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa bantuan akan didistribusikan secara bertahap sehingga terdapat beberapa warga yang sudah memperoleh bantuan dan terdapat pula beberapa warga lainnya yang belum mendapatkan bantuan. Pemberitaan selanjutnya terkait dengan informasi detail bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, informasi detail terkait bantuan diharapkan dapat diperoleh dari RW yang melaporkan data warganya atau bisa juga dilaporkan secara kolektif oleh Kelurahan. Berita pada tema kedua ini diakhiri dengan pemberitaan tentang keterbukaan informasi publik terkait bantuan yang disalurkan kepada masyarakat. Daftar penerima bantuan kemudian dipublikasikan dan disebar ke semua Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya, dengan harapan masyarakat dapat dengan mudah mengakses daftar penerima bantuan bagi masyarakat terdampak covid tersebut.

Dari segi makna teks, pemberitaan pada tema kedua lebih menekankan pada klarifikasi terkait kisruh bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang dirasa masyarakat belum tepat sasaran dan merata. Jika merujuk pada pernyataan salah satu narasumber pada pemberitaan tema kedua ini, memang terdapat beberapa variabel yang berbeda dalam penentuan penerima bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Dari empat berita, hanya terdapat dua berita yang benar-benar memuat informasi penting terkait bantuan Covid-19. Kedua berita tersebut adalah berita tentang penerimaan paket sembako dan berita tentang keterbukaan informasi publik terkait daftar penerima bantuan Covid-19 di Kota Surabaya. Melihat teks dan kesesuaiannya dengan tujuan dan maknanya, maka pemberitaan pada tema kedua ini dirasa kurang cukup efektif. Alasannya adalah karena pada masa penerapan kebijakan PSBB bantuan sosial maupun bantuan sembako menjadi komponen yang sangat amat penting untuk mensukseskan kebijakan PSBB. Sehingga alih-alih melakukan klarifikasi, akan lebih efektif jika pemberitaan diarahkan untuk menyampaikan informasi terkait bagaimana agar masyarakat dapat memperoleh bantuan sembako atau bantuan Covid-19. Terkait dengan leksikon dan metafora, pada tema kedua ini pilihan kata dan ungkapan yang digunakan tidak terlalu berlebihan dan terkesan standard dan biasa-biasa saja.

Tema ketiga yang dibahas adalah insentif kepada pelaku usaha, pada tema ini hanya terdapat satu artikel yang dipublish di portal surabaya.go.id pada tanggal 8 Mei 2020. Dalam artikel tersebut diberitakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya mencoba untuk mengajak para pelaku UMKM agar dapat bekerjasama dalam menangani pandemic Covid-19. Upaya kerjasama ini bertujuan untuk menghidupkan kembali sektor perekonomian yang tengah melemah akibat dari dampak Covid-19. Cara yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan melibatkan para pelaku UMKM dalam pembuatan alat pelindung diri, masker, maupun produk makanan dan minuman yang dapat mencegah Covid-19 maupun sebagai substitusi dan pemenuhan kebutuhan di tengah pandemi. Makna teks yang terkandung dalam pemberitaan ini lebih mengarah pada dampak dari pandemi Covid-19 yang ternyata juga berpengaruh di sektor perekonomian. Pesan yang hendak disampaikan dalam tema ini adalah, semua pihak harus turut bekerjasama dan saling bahu membahu untuk mengatasi kompleksitas permasalahan akibat pandemi Covid-19. Leksikon yang dipilih dan digunakan dalam pemberitaan di tema ketiga masih bersifat umum dan digunakan untuk membantu menjelaskan pemberitaan agar menjadi semakin mudah dicerna oleh pembaca. Leksikon yang dipilih pada tema ketiga ini antara lain adalah “melibatkan”, “memberdayakan”, dan “kolaborasi”.

Tema keempat adalah pemberitaan terkait pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB. Pemberitaan terkait dengan tema ini dimulai dari tanggal 28 April 2020 sampai dengan 10 Mei 2020 yang terdiri dari 7 artikel. Artikel pertama diawali dengan judul Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi penerapan PSBB, dilaporkan bahwa terjadi beberapa penumpukan kendaraan di berbagai titik pemeriksaan. Salah satunya di perbatasan Surabaya Sidoarjo yaitu Bundaran Waru. Pemberitaan pada hari berikutnya masih tetap dengan topik yang sama yaitu evaluasi lanjutan terhadap pelaksanaan PSBB dimana ditemukan masih terdapat beberapa warung kopi yang beroperasi tanpa menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan juga terdapat beberapa pengendara sepeda motor yang masih berboncengan. Artikel keempat ditekankan pada evaluasi pelaksanaan kebijakan PSBB setelah satu pekan berlalu, dari artikel tersebut dapat dilaporkan bahwa sebagian bidang sudah melaksanakan kebijakan PSBB dengan cukup baik, salah satunya adalah bidang pendidikan. Selain itu bidang sosial juga telah menerapkan kebijakan PSBB seperti penundaan kegiatan pesta baik itu pesta pernikahan maupun pesta khitanan.

Artikel kelima dari tema keempat menceritakan tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di pasar tradisional. Beberapa upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota salah satunya dengan membagikan masker secara gratis, membagikan hand sanitizer untuk pedagang, melakukan pengawasan ketat dengan cek suhu tubuh serta memasang wastafel dan bilik sterilisasi. Kemudian berselang 5 hari yaitu pada tanggal 10 Mei 2020 baru terbit lagi artikel terkait PSBB yaitu dengan judul “Pelanggar PSBB tahap kedua bakal diberi sanksi lebih tegas”. Dari hasil evaluasi Tim Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya dapat dilaporkan bahwa sekitar 60% warga Surabaya telah menaati peraturan yang ada baik itu PSBB maupun anjuran physical distancing dan sekitar 40% warga yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku pada penerapan kebijakan PSBB tahap pertama.

Tema keempat diakhiri dengan artikel tentang penegakan penerapan protokol Covid-19. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak henti-hentinya terus mengontrol warganya agar patuh dan taat mengikuti protokol selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku. Dalam artikel ini juga dijelaskan terkait bagaimana sikap Pemerintah terhadap pelanggar kebijakan PSBB, salah satunya adalah dengan menyita KTP pemilik toko dan memprosesnya ke pengadilan.

Secara makna teks, ketujuh artikel yang diterbitkan pada tema keempat telah cukup jelas menegaskan bagaimana posisi Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan Covid-19.

Secara tegas juga sudah dijelaskan beberapa sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Namun masih terdapat beberapa hal yang belum begitu jelas dan informatif bagi masyarakat. Khususnya terkait rincian jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, juga belum begitu jelas terkait deskripsi upaya penegakan protokol Covid-19 di perusahaan. Perlu kiranya beberapa hal tersebut untuk lebih didetailkan lagi, sehingga menghindari adanya kluster baru untuk kasus Covid-19.

Dilihat dari leksikon dan pilihan kata yang dipilih, pemberitaan pada tema keempat lebih banyak menekankan pada tindakan evaluasi, jenis dan upaya penegakan kebijakan PSBB. Sehingga banyak istilah-istilah hukum yang digunakan dalam beberapa artikel di tema keempat ini. Antara lain “pembelajaran masyarakat untuk masyarakat”, “check point”, “penindakan”, “sosialisasi”, “teguran lisan”, “teguran tertulis”, dan “operasi”. Sedangkan metafora yang digunakan lebih pada penekanan tindakan seperti “massif terjun”, “getol memberikan sanksi”, dan “tak henti-hentinya terus mengontrol”. Dari segi makna dan keterkaitan antara pilihan kata semua leksikon dan metafora yang digunakan pada artikel di tema keempat masih dipahami dengan mudah dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan pemberitaan.

Tema kelima adalah tentang lain-lain (terkait PSBB), tema kelima ini merupakan tema jumlah artikel terbanyak dibandingkan dengan tema-tema yang lainnya. Total sekitar 14 artikel yang terpublish di portal surabaya.go.id. Kebanyakan artikel pada tema kelima ini lebih menekankan pada kejadian-kejadian dampak covid-19 terutama bagi tenaga medis dan masyarakat secara umum. Seperti pemberitaan tentang meninggalnya salah satu tenaga medis yang menangani Covid-19, dimana diberitakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya turut berduka cita dan berupaya untuk melakukan segala sesuatu untuk dapat menekan dan meminimalisir jatuhnya korban baik dari tenaga medis maupun dari masyarakat.

Selain artikel tentang tenaga medis, tema kelima juga membahas tentang dampak penerapan kebijakan PSBB di sektor transportasi, dimana dua terminal besar yang menghubungkan Kota Surabaya yaitu terminal Purabaya (Bungurasih) dan terminal Oso Wilangun diberlakukan pemberhentian operasional selama masa PSBB berlangsung. Pemberhentian operasional dua terminal ini tentunya mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020, serta peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020. Artikel selanjutnya memberitakan tentang bantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Surabaya berupa Alat Pelindung Diri, PCR Reagen, alat test swab, dan beberapa bantuan lain seperti sembako dan bantuan tenaga medis. Bantuan tersebut berasal

dari keluarga Buddhayana dan Kementerian Kesehatan, total terdapat empat artikel yang memberitakan tentang bantuan di tema keempat ini.

Pemberitaan yang lain terkait tema lain-lain (terkait PSBB) adalah tentang dikeluarkannya Surat Edaran dari Walikota Surabaya mengenai peningkatan kewaspadaan. Surat Edaran dari Walikota Surabaya tersebut merupakan antisipasi terhadap tindak kriminal dan upaya menciptakan keamanan bagi Warga Kota Surabaya. Kemudian terdapat juga pemberitaan tentang perempuan yang terkena cairan disinfektan dan mengaku muncul bentol-bentol merah yang ternyata bentol-bentol tersebut merupakan penyakit herpes. Permasalahan terkait Covid-19 tidak hanya terhenti di urusan kesehatan, maraknya tindak kriminalitas, dan komplain dari warga terkait kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya. Permasalahan terkait penanganan Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pengawasan (ODP), dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kota Surabaya khususnya Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya. Diberitakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya melalui Walikota Tri Rismaharini memberikan perhatian dan kepedulian yang lebih terhadap warga Kota Surabaya yang berstatus OTG, ODP, dan PDP. Bahkan Walikota tidak segan untuk menghubungi satu per satu pasien melalui gawainya untuk sekedar menanyakan kondisi mereka.

Artikel selanjutnya memberitakan tentang penghapusan denda PBB bagi masyarakat di tengah pandemic Covid-19. Penghapusan denda PBB ini bertepatan dengan hari jadi Kota Surabaya dan berlaku selama tiga bulan dari April sampai dengan Juni 2020. Diberitakan bahwa tujuan dari penghapusan denda PBB tersebut adalah untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat Kota Surabaya untuk membayar pajak. Pajak dari masyarakat tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai anggaran tambahan bagi Pemerintah Kota untuk menangani Covid-19. Pemberitaan selanjutnya terkait upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mengajak UMKM berkolaborasi dalam menangani Covid-19. Kolaborasi antara Pemerintah Kota dan UMKM diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap jumlah produksi UMKM di Kota Surabaya. Produksi UMKM meliputi peralatan yang menunjang dalam dunia kesehatan seperti APD maupun makanan dan minuman.

Tiga artikel terakhir terkait tema kelima lebih fokus membahas tentang penilaian pihak luar terhadap kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani Covid-19, kemudian evaluasi terhadap jumlah klaster Covid-19 yang ada di Surabaya, dan prestasi salah satu staff Disbudpar yang menciptakan lagu tentang Covid-19 untuk memberikan semangat bagi masyarakat. Pemberitaan tentang penilaian pihak luar terhadap kinerja Pemerintah

Kota Surabaya dalam menangani Covid-19 dapat dilihat melalui artikel yang diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2020, dalam artikel tersebut diberitakan bahwa terdapat tiga purnawirawan jenderal yang ditugaskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk berkunjung ke Surabaya memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani Covid-19. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2020 diterbitkan artikel tentang 16 Klaster Covid-19 yang terdeteksi di Surabaya, dimana dalam artikel tersebut dijelaskan secara detail di mana saja klaster Covid-19 yang ada di Surabaya. Terdapat satu informasi penting dalam artikel tersebut, yang memberitahukan bahwa tidak semua temuan kasus di suatu lokasi langsung dijadikan kluster baru. Berita terakhir adalah tentang prestasi salah satu staff Disbudpar yang menciptakan lagu sebagai wujud ajakan untuk bersama-sama melawan Virus Corona. Staff tersebut bernama M.T. Agus, dan lagu yang diciptakan berjudul Bersatu Melawan Virus Corona. Diberitakan bahwa lagu tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk sosialisasi dalam proses penanganan Covid-19.

Secara makna teks, tema kelima ini lebih variatif dan beragam. Meskipun tema yang diangkat adalah lain-lain (terkait PSBB) namun jumlah artikel yang terpublish pada tema ini tergolong yang paling banyak dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Meskipun dalam satu tema ini terdapat beberapa pembahasan yang berbeda, namun kesemua artikel yang terbit pada tema ini memiliki korelasi antara satu dengan yang lainnya. Misalnya artikel tentang penghapusan denda PBB yang memiliki korelasi dengan artikel tentang UMKM. Pun juga demikian dengan artikel yang lainnya. Namun jika dilihat dari Substansi dan tujuan penerbitan artikel, maka artikel yang terbit pada tema ini seharusnya bisa dikurangi karena kurang begitu memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat khususnya terkait Kebijakan PSBB. Akan menjadi efektif jika artikel yang terkait tema PSBB lebih banyak dipublikasikan sehingga masyarakat akan lebih banyak mendapatkan informasi terkait kebijakan PSBB serta langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan sehingga artikel yang terbit tersebut dapat memberikan kontribusi dalam mensukseskan pelaksanaan kebijakan PSBB.

Dilihat dari leksikon atau pemilihan kata dan metaforanya, tema kelima memiliki leksikon yang tidak cukup sulit dan mudah dipahami oleh pembaca seperti “mobil keliling”, “protokol kesehatan”, “dapur umum”, dan “tracing”. Sedangkan metafora yang digunakan juga tergolong umum dan mudah dipahami juga seperti “meringankan beban masyarakat”, Garda Terdepan”, “Sambungan telepon”, “Secarik kertas”, dan “Bahu membahu”. **Tema keenam** adalah artikel dengan pembahasan yang tidak terkait PSBB.

Sehingga pada tema keenam ini memang tidak dilakukan tabulasi data dan analisis terhadap latar, pra anggapan dan leksikonnya. Artikel yang dipublikasikan pada tema keenam lebih mengarah pada pemberitaan seputar Kota Surabaya dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan PSBB.

C. Kognisi Penulis Berita terhadap Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya

Proses Produksi Berita pada Portal Online Pemerintah Kota Surabaya

Bagian Humas Surabaya memiliki tiga sub-bagian yakni Sub-Bagian Layanan Informasi, Sub-Bagian Liputan Berita dan Pers dan Sub-Bagian Dokumentasi dan Pelaporan. Terkait produksi berita pada laman <https://surabaya.go.id/id/berita>, sub-bagian yang bertanggung jawab adalah Sub-Bagian Liputan Berita Pers. Sebelum melakukan rilis berita pada laman tersebut, sub bagian ini menyusun *agenda setting* terlebih dahulu. Pelaksanaan *agenda setting* dilakukan setiap minggu. Dalam kegiatan *agenda setting*, menu berita harian ditentukan selama satu pekan ke depan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Pak Jefry selaku Kasubag Layanan informasi seperti berikut

Kalau kami ada namanya agenda setting Pak. Itu dilakukan setiap minggu. Agenda setting itu istilahnya daftar menu baik untuk media massa maupun media sosial. Sebenarnya saya ini pelayanan informasi itu menyetting media sosial. Untuk yang agenda setting di media massa (portal berita online) yang dalam bentuk rilis itu ada di Kasubag Liputan dan Pers.....Tapi secara prinsip kurang lebihnya sama. Secara prosesnya sama. Jadi kita bukan diskusi (penyusunan agenda setting) harian. Kita tentukan tema selama satu minggu ke depan. (wawancara dengan Pak Jefry, Kasubag Layanan informasi di Kantor Humas Pemerintah Kota Surabaya)

Dalam kegiatan *agenda setting*, Sub-bagian Liputan Berita dan Pers melakukan penggalian data terlebih dahulu. Penggalian data ini dilakukan oleh baik oleh penulis berita maupun oleh setiap kasubag. Kantor Humas sendiri memiliki tiga penulis berita dan tiga kasubag. Dalam proses penggalian data, mereka berkomunikasi dengan beberapa dinas yang ada di Kota Surabaya. Namun informasi-informasi mengenai pandemi Covid-19 dan pelaksanaan kebijakan PSBB ini lebih banyak diperoleh dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPBLinmas). Bagian Humas melakukan penggalian data di posko terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Keberadaan posko terpadu ini memberikan kemudahan bagi Humas Pemkot Surabaya dalam melakukan penggalian data. Posko terpadu ini berlokasi di Taman Surya di depan Balai Kota Surabaya. Berikut kutipan wawancara mengenai informasi tersebut

Keduanya pak. Pertama dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Kebetulan kita ada posko yang dibentuk oleh Bu Wali di halaman Taman Surya. Jadi setiap hari kita

updating data disana sangat mudah. Karena ada posko terpadu misalnya kita ingin menggali data tentang apa sangat mudah. Selain itu seperti yang dikatakan pak Udin. Kita juga merespon dinamika di public atau media massa. (wawancara dengan Pak Jefry, Kasubag Layanan informasi di Kantor Humas Pemerintah Kota Surabaya)

Dalam aktifitas *Agenda setting* tidak hanya mendisikusi perihal data-data yang telah diperoleh dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja namun juga dengan mempertimbangkan informasi dari sumber yang lain. Penentuan menu berita harian juga kadang dipengaruhi oleh beredarnya informasi di portal berita yang lain dan kebutuhan informasi warga Surabaya yang bisa diidentifikasi dari berbagai sumber. Berita online Pemerintah Kota Surabaya kadang juga merupakan bentuk respon atau klarifikasi atas berita dari media massa lain. Seperti halnya berita yang dimuat pada Hari Sabtu, 2 Mei 2020 bertajuk “Dianggap Lamban Tangani Kasus Covid-19 PT HM Sampoerna, Pemkot Nilai Gubernur Keliru”, merupakan bentuk konfirmasi atas berita-berita sebelumnya yang memberitakan tentang lambannya Pemkot Surabaya dalam menangani Kasus Covid-19 di PT HM Sampoerna. Selain itu, beberapa berita yang dirilis oleh Humas juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi warga Surabaya.

Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya mengidentifikasi kebutuhan informasi warga dengan cara memantau komentar warga yang disampaikan di beberapa media yakni di Suara Surabaya, Detik.com dan media sosial Bangga Surabaya milik Pemkot Surabaya. Berdasarkan hasil survei sebelumnya, sebelum masa Pandemi Covid-19, yang dilakukan bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya, diperoleh data yakni warga Kota Surabaya banyak mengakses ketiga sumber berita tersebut untuk mengetahui informasi seputar Kota Surabaya. Survei yang sama dilakukan rutin setiap bulan..... Media Suara Surabaya sendiri terdiri dari radio, berita online yang dilengkapi kolom komentar dan media sosial. Sedangkan Detik.com adalah berita online yang juga dilengkapi kolom komentar. Selain beberapa sumber tersebut, pembicaraan masyarakat seperti halnya tetangga juga menjadi pertimbangan dalam mengidentifikasi kebutuhan warga. Berikut hasil wawancara yang menegaskan pernyataan tersebut

Biasanya kita itu melihatnya dari SS (Suara Surabaya) Pak. Jadi ada portal berita yang lain. Jadi isu atau berita yang kita share kan juga dimuat di SuaraSurabaya.net, misalkan detik.com itu ada kolom komen. Nah kita acuannya disitu. Suara Surabaya sama detik seh yang paling sering itu. Itu yang paling sering Pak kalau untuk yang kami jadikan referensi untuk melihat bagaimana sih feedback masyarakat terkait berita yang kita tampilkan..... Kalau media social itu. Lebih sering ke akun kami pak menariknya. Jadi dari IG (Instagram), IG mana? IG Surabaya. Akun medsos kami yang kami kelola maksudnya. (wawancara dengan Pak Jefry, Kasubag Layanan informasi di Kantor Humas Pemerintah Kota Surabaya)

Setelah agenda setting telah ditentukan untuk satu minggu ke depan. Berikutnya adalah proses penulisan berita. Berita yang dimuat dalam laman <https://surabaya.go.id/id/berita> ditulis oleh 3 penulis berita. Satu artikel berita ditulis oleh 1 penulis. Penulisan artikel berpedoman pada kaidah-kaidah jurnalistik. Berdasarkan agenda setting, dalam satu hari berita yang dirilis bisa satu hingga tiga artikel. Namun terkait jumlah berita rilis per hari ini juga sangat dinamis. Kadang dalam sehari, jumlah rilis berita hingga lima artikel. Berikut merupakan pernyataan Pak Jefry, Kasubag Layanan Informasi

Kalau agenda setting rata-rata kita ada 2 sampai 3 tema. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 kisarannya. Itu yang setting. Rilis tidak hanya dari agenda setting. Rilis ada yang dari agenda setting. Dalam arti direncanakan dalam tabel tadi, dikonsep. Ada rilis yang sifatnya kondisional. Kondisional artinya Bu Risma menerima bantuan dari ini, momentual. Bu Risma keliling rumah sakit untuk menyalurkan APD (Alat Pelindung Diri). Itu momentual di luar yang ini tadi. Ada juga yang sifatnya klarifikasi. Itu tiga jenis rilis yang berbeda. (wawancara dengan Pak Jefry, Kasubag Layanan informasi di Kantor Humas Pemerintah Kota Surabaya)

Sebagai upaya menyebarkanluaskan artikel berita yang ditulis oleh Bagian Humas Pemkot Surabaya, mereka mengirimkan artikel berita ke 40 hingga 50 jurnalis dari beberapa media massa yang lain. Tidak selalu artikel berita yang dikirimkan tersebut akan dimuat oleh jurnalis dari media massa yang lain. Namun artikel berita yang dirilis dalam portal <https://surabaya.go.id/id/berita> juga kadang dimuat di beberapa portal berita lain baik dalam bentuk asli atau yang sudah dimodifikasi. Berikut kutipan wawancara yang menjelaskan perihal tersebut.

Kita ini ngasihnya ke media sudah dalam bentuk susunan berita. Biasanya teman-teman media itu ngedit dikit terus dinaikkan. Jadi yang dimaksud berita rilis itu adalah berita jadi dari kita karena memang mintanya wartawan disini itu dalam bentuk tulisan yang berita. Jadi yang kita share itu sama dengan yang naik di portal itu Pak. Kita share berita ada foto sudah lengkap dengan kutipan narasumber kita naikkan kita naikkan di website lalu kita email ke email-email wartawan. Dari situ ada teman-teman yang langsung menaikkan karena dipandang sudah bahasanya sudah oke. Ada yang mengedit dikit diedit lipnya tapi tidak merubah substansi juga ada. (wawancara dengan Pak Jefry, Kasubag Layanan informasi di Kantor Humas Pemerintah Kota Surabaya).

Perspektif Penulis Berita terhadap Kebijakan PSBB dan Karakter Pembaca

Kognisi atau cara berpikir penulis berita mempengaruhi kegiatan produksi berita. Perspektif penulis berita terhadap pelaksanaan Kebijakan PSBB Pemkot Surabaya mempengaruhi mereka dalam memproduksi berita. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pak Jefry selaku Kasubag Pelayanan Informasi, bahwa penulis berita yang juga

menjadi bagian dari Humas Pemkot Surabaya memandang Kebijakan PSBB sebagai salah satu cara dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Namun yang lebih penting adalah kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Beranjak dari hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya membuat beberapa protokol kesehatan untuk berbagai sektor misal protokol untuk restoran, protokol untuk kantor dan lain-lain.

Kebijakan PSBB dianggap tidak hanya sebagai isu kesehatan namun juga isu ekonomi. Kebijakan PSBB menjadi salah satu strategi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Di lain sisi kebijakan PSBB ini juga berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat. Adanya kebijakan ini akan berpengaruh pada melambatnya atau bahkan menghentikan aktivitas untuk sektor-sektor tertentu. Dampaknya adalah kerugian ekonomi yang diderita oleh beberapa sektor tersebut. Kebijakan PSBB dianggap tidak menyeimbangkan kedua isu tersebut. Isu ekonomi kurang mendapatkan perhatian dalam penerapan kebijakan PSBB. Pembuatan dan penerapan beberapa protokol kesehatan yang berbeda untuk beberapa sektor tertentu dianggap sebagai penyeimbang antara isu kesehatan dan isu ekonomi. Berikut petikan wawancara yang menegaskan pernyataan tersebut.

Ya jadi kalau kami ya memandang PSBB itu sebenarnya kami sepaham dengan konsep yang diusung Bu Risma. Yang terpenting dalam situasi pandemi ini sebenarnya bukan soal PSBB atau bagaimana tapi lebih ke pemantapan protocol. Jadi protocol kesehatan, misalkan apa sih bedanya dengan antara PSBB dengan protocol kesehatan yang ini ya. Jadi kalau PSBB itu ada plus minusnya bapak. Minusnya itu memang tentu dari segi ekonomi ya. Usaha yang harusnya buka, dia menjadi nggak buka. Contoh paling sederhana adalah usaha kuliner. Orang punya kafe atau warung bakso atau apa. Itu tentu omsetnya akan terbatas, menurun. Karena dipukul rata tutup atau take away. Jadi kursi-kursi sudah nggak ada. Itu sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi. Tapi yang diusung oleh pemikiran Bu Risma adalah boleh dengan syarat, boleh dengan protocol yang harus diterapkan. Makanya Pemerintah Kota Surabaya sempat membuat protocol per bidang, protocol restaurant seperti ini, protocol di kantor harus seperti ini. Karena dari segi pemerintah itu memandang ini dua sisi pak. Dua sisi itu factor kesehatan dan factor ekonomi. (wawancara dengan Pak Jefry, Kasubag Layanan informasi di Kantor Humas Pemerintah Kota Surabaya).

Selain cara pandang terhadap kebijakan PSBB, cara pandang penulis berita terhadap karakter pembaca juga mempengaruhi aktifitas produksi berita. Jika dilihat dari Tabel Kategori Artikel Berita Selama Kebijakan PSBB Periode Pertama Kota Surabaya, jumlah berita dengan topik PSBB (bantuan kebutuhan dasar, insentif kepada pelaku usaha, pemantauan dan evaluasi) sejumlah 12 artikel dari total 37 artikel. Terkait berita tentang pemantauan atau monitoring di lapangan. Berita pemantauan cenderung pada pemantauan pasar atau fasilitas umum. Pemantauan terhadap industri-industri kurang mendapatkan

perhatian. Industri terutama industri besar dianggap telah sadar menerapkan protokol kesehatan. Hal ini seperti yang diketahui dari hasil wawancara berikut

Kerumunan kalau semuanya negatif kan tidak menjadi soal. Bukan berarti kita pro kerumunan. Kerumunan tetap dikontrol. Toh di industri apalagi di industri besar itu kan juga protocol kesehatannya sudah diterapkan. (wawancara dengan Pak Jefry, Kasubag Layanan informasi di Kantor Humas Pemerintah Kota Surabaya).

Namun kenyataannya dalam pemberitaan laman berita online Pemkot Surabaya tanggal 2 Mei 2020, bahwa salah satu industri besar di Kota Surabaya terdapat puluhan karyawannya yang dikonfirmasi positif Covid-19. Kemungkinan penyebab tertularnya karyawan bisa karena beberapa hal. Karyawan tersebut bisa jadi tertular di tempat lain. Namun jumlah karyawan yang positif Covid-19 cukup banyak maka rasional jika pemberitaan pengawasan terhadap industri masuk pada *agenda setting* pemberitaan. Namun sempat disampaikan oleh pihak Humas Pemkot Surabaya bahwa pemberitaan pengawasan industri tidak menguntungkan. Selain itu pemberitaan pengawasan industri tidak dilakukan karena banyak industri yang tutup pada masa PSBB. Berikut kutipan wawancaranya

Kita memang melakukan lho yang namanya monitoring industri itu rutin. Itu rutin. Dan kebetulan setelah Sampoerna itu, industry tidak ada yang buka. Apa yang mau disurvei. Industri itu tutup pak karena PSBB itu. Sehingga kita dari Humas itu mengambil keputusan untuk menerapkan penanganan. Oke ini diklarifikasi tapi kita, di humas itu ada beberapa langkah, salah satunya distraction namanya. Jadi supaya publik itu nggak fokus ke hal ini terus. Toh ini juga sudah diklarifikasi kok. Dibilang lambat, kronologisnya seperti ini. Kita anggap selesai disitu. Cut. Kita jangan main di isu ini lagi karena efeknya nggak akan menguntungkan di kita. Misalkan survei apa, toh yang di survei tidak banyak yang buka, tutup semua. Udah akhirnya kita cut. Langsung kita munculkan isu-isu yang baru, yang apa, memori masyarakat itu kan memori pendek pak. Jadi tutup dengan hal-hal lain yang. Karena ini sudah beres, ndak perlu diperpanjang. (wawancara dengan Pak Jefry, Kasubag Layanan informasi di Kantor Humas Pemerintah Kota Surabaya).

D. Wacana Pelaksanaan Kebijakan PSBB yang Berkembang dalam Masyarakat Kota Surabaya.

Wacana yang berkembang dalam masyarakat Kota Surabaya mengenai PSBB dapat diidentifikasi melalui respon mereka terhadap postingan akun resmi media sosial pemerintah kota. Respon ini bisa dalam bentuk “like” maupun “comment. Meskipun peneliti melakukan penelitian pemberitaan kebijakan PSBB pada laman berita pemerintah kota namun respon masyarakat yang dikaji yang berada pada akun resmi media sosial. Hal ini dikarenakan tidak adanya kolom komentar pada laman berita pemerintah kota.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki tiga akun resmi di beberapa jenis media sosial yakni facebook, twitter, instagram dan youtube. Nama akun resminya adalah Bangga Surabaya. Dari berbagai jenis media sosial tersebut, *follower* paling banyak adalah akun resmi di instagram yakni 279k (ribuan) *follower* (per 27 Oktober 2020). Kemudian akun resmi di facebook memiliki 147.122 *follower*, Twitter sebanyak 100k *follower* dan Youtube sebanyak 24,2k *subscribers*. Berdasarkan hal itu pula, peneliti memberi fokus analisa pada respon masyarakat di akun resmi media sosial instagram. Peneliti menilai respon masyarakat di akun instagram resmi cukup mewakili wacana yang berkembang di masyarakat.

Gambar 5.2 Akun Resmi Instagram Pemerintah Kota Surabaya



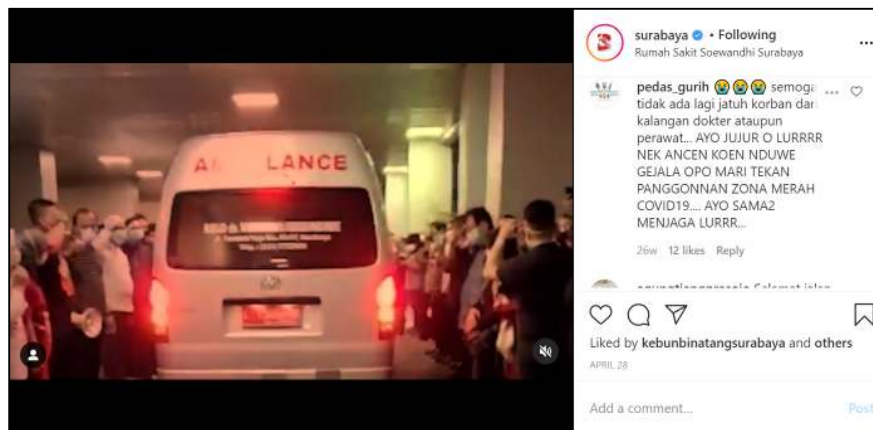
Sumber: Akun Resmi Instagram "Bangga Surabaya"

Pemberitaan PSBB di laman instagram tidak hanya dilakukan pada saat periode PSBB berlangsung yakni mulai tanggal 28 April hingga 11 Mei 2020. Namun tiga hari sebelumnya yakni mulai tanggal 25 April 2020 telah diunggah tiga postingan. Tanggal 25 April 2020, pemerintah kota menjelaskan bahwa masa PSBB di Kota Surabaya dilakukan mulai tanggal 28 April hingga 11 Mei 2020. Pemerintah menjelaskan bahwa PSBB merupakan salah satu upaya penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Surabaya dan mengajak masyarakat untuk mematuhi kebijakan tersebut. Di hari berikutnya tanggal 26 April 2020, pemerintah kota memberikan penjelasan mengenai penggunaan transportasi selama PSBB. Pada tanggal 27 April 2020, Bagian Humas mengunggah video yang menceritakan salah satu kampung yang menerapkan Protokol Covid-19 secara ketat. Kampung tersebut memiliki Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 yang mengedukasi masyarakat tentang Covid-19 dan memantau penerapan protokol kesehatan. Komentar warganet yang paling banyak mendapatkan "like" terhadap dua postingan pertama menyampaikan bahwa pemerintah perlu memperhatikan persoalan bantuan sembako dan jenis bantuan lain kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, yang terdampak kebijakan PSBB.

Postingan pertama pada masa PSBB, tanggal 28 April 2020, yakni pemerintah kota menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Dr. Berkatnu Indrawan Janguk. Pemerintah mengapresiasi perjuangan beliau dalam melawan Pandemi Covid-19 dan pemerintah akan meneruskan perjuangan almarhum. Postingan ini mendapatkan respon yang cukup banyak baik dalam bentuk “like” maupun “komentar”. Komentar yang mendapatkan “like” paling banyak adalah komentar dari akun “pedas_gurih” yakni 12 likes. Berikut komentar dari akun tersebut

semoga tidak ada lagi jatuh korban dari kalangan dokter ataupun perawat...AYO JUJUR O LURRRR NEK ANCEN KOEN NDUWE GEJALA OPD MARI TEKAN PANGGONNAN ZONA MERAH COVID19...AYO SAMA2 MENJAGA LURRR...

Gambar 5.3 Komentar pada Postingan 28 April 2020 dengan “like” Terbanyak



Sumber: Akun Resmi Instagram “Bangga Surabaya”

Postingan kedua yakni pada tanggal 1 Mei 2020. Dalam postingan ini pemerintah kota menunjukkan bahwa mereka terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal tata tertib selama PSBB diberlakukan. Mulai tanggal 1 Mei 2020 sudah dilakukan penindakan sanksi jika melanggar ketentuan PSBB yang berlaku. Mulai dari sanksi teguran secara lisan, tertulis hingga paksaan. Postingan ini cukup banyak mendapatkan komentar dari warganet. Komentar dari akun “lutfi.rahman15” mendapatkan “like” terbanyak yakni sejumlah 52 likes. Komentar dari akun “zaskiaoliviaap” juga mendapatkan like cukup banyak yakni sejumlah 42 likes. Kedua komen ini menyoroti beberapa tempat yang masih banyak terdapat orang berkerumun. Berikut adalah gambar dari kedua komen tersebut.

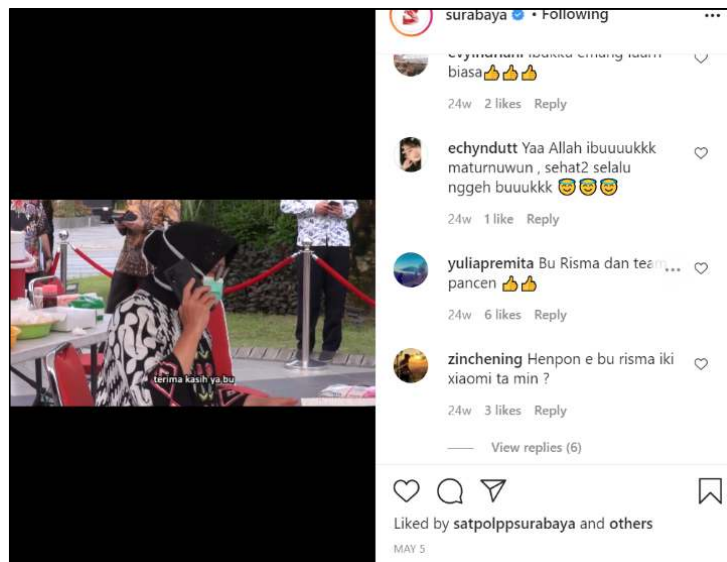
Gambar 5.4 Komentar pada Postingan 1 Mei 2020 dengan “like” Terbanyak



Sumber: Akun Resmi Instagram “Bangga Surabaya”

Postingan ketiga yakni pada tanggal 5 Mei 2020. Dalam postingan ini menunjukkan bahwa Walikota Tri Rismaharini turut menyiapkan minuman tradisional pokak untuk ODP, PDP dan OTG dan mendorong semangat pasien Covid-19 via telepon. Dalam postingan video tersebut juga diberitahukan bahwa pemerintah kota juga mengirimkan telur kepada para pasien. Salah satu komen yang paling banyak mendapatkan “like” yakni dari akun “yuliapremita”. Akun ini mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh walikota.

Gambar 5.5 Komentar pada Postingan 5 Mei 2020 dengan “like” Terbanyak

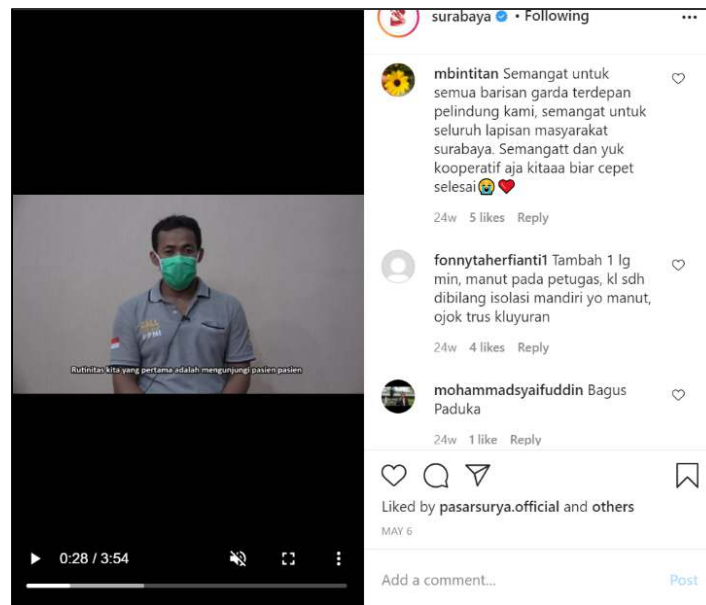


Sumber: Akun Resmi Instagram “Bangga Surabaya”

Postingan keempat diunggah pada tanggal 6 Mei 2020. Video ini memberitahukan bahwa 3 kelompok yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 adalah dokter, perawat dan tenaga surveillance. Salah satu tenaga surveillance yang bernama Achmad Fiqqy Fierly bercerita tentang suka dukanya menjadi tenaga surveillance. Postingan ini

mendapatkan komentar simpatik dari warganet. Salah satu komentar yang mendapatkan “like” terbanyak, yakni 5 likes, adalah komentar dari akun “mbintitan”. Akun ini memberikan komentar sebagai berikut “Semangat untuk semua barisan garda terdepan pelindung kami, semangat untuk seluruh lapisan masyarakat Surabaya. Semangatt dan yuk kooperatif aja kitaaa biar cepet selesai”.

Gambar 5.6 Komentar pada Postingan 6 Mei 2020 dengan “like” Terbanyak (Postingan Pertama)



Sumber: Akun Resmi Instagram “Bangga Surabaya”

Postingan kelima yakni masih diunggah pada tanggal 6 Mei 2020. Postingan ini menunjukkan hasil evaluasi penerapan kebijakan PSBB selama satu pekan. Dalam bidang pendidikan, hasil evaluasi menunjukkan tidak ada aktivitas di sekolah baik di sekolah negeri dan sekolah swasta. Semua aktivitas sudah dilakukan di rumah. Bidang sosial budaya, untuk acara pernikahan, khitanan dan beberapa acara yang mengundang banyak orang untuk kumpul juga relatif nihil. Kegiatan di taman-taman Surabaya juga sudah ditutup. Bidang keagamaan, dari 2.504 masjid di mushola, ada sebanyak 290 masjid atau mushola yang masih melakukan ibadah Tarawih dan sekitar 96 masjid masih melaksanakan sholat Jumat. Dalam bidang perdagangan masih banyak dijumpai pelanggaran misalnya warga makan di warung dan mengadakan sahur bersama. Seharusnya merka hanya boleh beli makanan dan tidak di makan di warung. Bidang transportasi, masih banyak ditemukan warga yang tidak menggunakan masker saat

berkendara. Komentar warganet yang paling banyak mendapatkan “like” adalah komentar dari akun “heidmss”. Komentar dari akun ini mendapatkan 8 likes. Akun ini memberikan komentar agar pemerintah kota lebih meningkatkan upaya merazia tempat ibadah.

Gambar 5.7 Komentar pada Postingan 6 Mei 2020 dengan “like” Terbanyak (Postingan Kedua)



Sumber: Akun Resmi Instagram “Bangga Surabaya”

Postingan keenam diunggah pada tanggal 7 Mei 2020. Postingan ini sama sekali tidak membahas kebijakan PSBB. Postingan ini memberikan ucapan selamat hari raya Waisak bagi masyarakat yang merayakan. Komentar yang paling banyak mendapatkan “like” yakni dari akun “maryamfly”. Komentar ini hanya mendapatkan 1 likes. Akun ini menawarkan barang dagangannya yakni disinfektan dan handsanitizer. Berikut adalah gambar komentar dari akun tersebut.

Gambar 5.8 Komentar pada Postingan 7 Mei 2020 dengan “like” Terbanyak



Sumber: Akun Resmi Instagram “Bangga Surabaya”

Postingan ketujuh diunggah pada tanggal 10 Mei 2020. Postingan ini berupa pesan dari Walikota Surabaya agar masyarakat tetap patuh pada Protokol Covid-19. Masyarakat diminta untuk tidak lupa cuci tangan, menggunakan masker dan *physical distancing*. Dampak ketidakpatuhan pada protokol akan menyebabkan penularan pada orang-orang di sekitar kita. Komentar dari warganet yang paling banyak memperoleh “like” adalah komentar dari akun “afifkf”. Komentar ini mendapatkan 22 likes. Akun ini berkomentar perihal walikota dalam membuat vlog. Berikut adalah tabel komentar tersebut.

Gambar 5.9 Komentar pada Postingan 10 Mei 2020 dengan “like” Terbanyak



Sumber: Akun Resmi Instagram “Bangga Surabaya”

Postingan kedelapan diunggah pada tanggal 11 Mei 2020. Dalam postingan ini diterangkan bahwa saat PSBB diterapkan justru angka positif Covid-19 di Surabaya naik. Hal ini bisa terjadi karena dinilai pemerintah gencar dalam melakukan tes rapid dan tes swab. Selain itu meningkatnya angka positif Covid-19 dianggap merupakan konsekuensi dari fungsi *tracing* yang berjalan dengan baik. Komentar yang mendapatkan “like” terbanyak adalah komentar dari akun “fitra_fachruddin93” yakni sebanyak 24 likes. Komentar dari akun ini memberikan penegasan bahwa PSBB tidak memutus penyebaran Covid-19. Dia menyatakan pemberitaan angka kematian akibat Covid-19 menyebabkan imun tubuh menurun. Meskipun komentar ini juga mendapat beberapa balasan ketidaksetujuan dan warganet yang lain. Berikut adalah gambar dari komentar “fitria_fachruddin93”.

Gambar 5.10 Komentar pada Postingan 11 Mei 2020 dengan “like” Terbanyak



Sumber: Akun Resmi Instagram “Bangga Surabaya”

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Portal online Pemerintah Kota Surabaya memuat banyak artikel yang memberitakan upaya pemerintah kota menghadapi Pandemi Covid-19 selama masa PSBB periode pertama. Namun pemberitaan PSBB tersebut masih memiliki setidaknya dua kekurangan. Pertama, tampilan berita online tidak menyediakan kolom komentar bagi pembaca. Hal ini menyebabkan tidak adanya *feed back* dari pembaca mengenai isi berita. Tanpa adanya rekaman *feed back*, Bagian Humas tidak akan mampu mengevaluasi pemberitaan dengan baik. Hal ini juga kurang bisa membangun hubungan yang dekat dengan para pembaca karena tidak memberikan media untuk berinteraksi dalam konteks aktivitas pemberitaan PSBB. Meskipun Bagian Humas juga memantau aspirasi masyarakat dari saluran media yang lain. Kedua, unsur edukasi kebijakan juga belum optimal. Konten berita yang ada lebih mengarah pada capaian-capaian pemerintah kota dan kegiatan walikota yang berhubungan dengan PSBB. Hal ini memberikan kesan bahwa pemberitaan PSBB difungsikan sekedar *image branding*. Padahal di sisi yang lain, pemberitaan juga perlu memperhatikan fungsi edukasi. Pemerintah perlu mengusahakan pemberitaan mengenai penerapan kebijakan secara komprehensif. Padahal masih tersedia cukup banyak kesempatan untuk melakukan upaya tersebut. Misalnya pemerintah belum memberikan pemberitaan yang bermuatan edukasi ragam protokol Covid-19 dan pengawasan kepatuhan protokol tersebut.

Berdasarkan beberapa temuan tersebut setidaknya bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan beberapa pertanyaan penelitian berikutnya. Pertama, bagaimana ketertarikan masyarakat terhadap portal berita milik pemerintah. Kedua, apa pentingnya muatan edukasi dalam pemberitaan kebijakan publik. Jawaban atas beberapa pertanyaan penelitian tersebut akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pemberitaan pada portal berita pemerintah.

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menentukan rumusan masalah yakni bagaimana analisis wacana kritis pemberitaan kebijakan PSBB pada portal online Pemerintah Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan strategi tekstual untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya bekerja keras dan profesional dalam mengatasi Pandemi Covid-19 selama periode pertama PSBB. Meskipun juga ditemukan bahwa terdapat unsur penting PSBB yang tidak mendapatkan porsi pemberitaan yang cukup. Pemberitaan yang dimaksud adalah pengawasan penerapan protokol Covid-19 oleh industri-industri yang berada di Kota Surabaya. Wartawan menilai pemberitaan tersebut kurang menguntungkan pemerintah kota. Padahal pemberitaan pengawasan juga menunjukkan bahwa pemerintah memastikan protokol Covid-19 selama PSBB bisa diterapkan dengan baik. Selain itu, melalui akun media sosial resmi pemerintah kota, warga juga memberikan perhatian atas pelanggaran-pelanggaran protokol Covid-19 yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa wilayah di Surabaya. Dalam media sosial tersebut, warga juga menagih bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil analisa wacana yang telah dilakukan, beberapa aspek pemberitaan online perlu diperbaiki. Pertama, portal berita semestinya menyediakan kesempatan untuk menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Bagian Humas perlu menambahkan kolom komentar pada portal berita milik pemerintah kota. Kedua, pencitraan atau *image branding* juga merupakan hal penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Namun edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan publik belum dilakukan dengan optimal. Padahal masih cukup banyak kesempatan untuk melakukan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Haryadi, Rohmat. 2020. Ketimbang PSBB di Surabaya, Ini Jurus Risma Tangkal Covid-19. Diakses pada tanggal 26 April 2020 melalui laman daring <https://www.gatra.com/detail/news/475135/kesehatan/ketimbang-psbb-di-surabaya-ini-jurus-risma-tangkal-covid-19>
- [2] Anonim. 2020. Jokowi Umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia. Diakses pada tanggal 26 April 2020 melalui laman daring <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia>
- [3] Mubyarsah, Latu Ratri. 2020. DPRD Ragu dengan Kekuatan Anggaran untuk Penerapan PSBB di Surabaya. Diakses pada tanggal 26 April 2020 melalui laman daring <https://www.jawapos.com/surabaya/21/04/2020/dprd-ragu-dengan-kekuatan-anggaran-untuk-penerapan-psbb-di-surabaya/>
- [4] Anonim. 2020. Wali Kota Risma “Manut” Keputusan Gubernur Soal PSBB. Diakses pada tanggal 27 April 2020 melalui laman daring <https://surabaya.go.id/id/berita/54482/wali-kota-risma-manut-keputus>
- [5] Anonim. 2020. Jelang PSBB, Pemkot Gelar rapat Koordinasi bersama Forpimda Surabaya. Diakses pada tanggal 27 April 2020 melalui laman daring <https://surabaya.go.id/id/berita/54587/jelang-pssb-pemkot-gelar-rapat>
- [6] Anonim. 2020. Jumlah Pekerja yang Kena PHK Akibat Corona Covid-19 di Surabaya Bikin Terkejut. Diakses pada tanggal 27 April 2020 melalui laman daring <https://surabaya.liputan6.com/read/4227981/jumlah-pekerja-yang-kena-phk-akibat-corona-covid-19-di-surabaya-bikin-terkejut#>
- [7] Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: CV Pustaka Setia
- [8] Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta: PT Gramedia
- [9] Syani, Ahmad Khoirul. 2017. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. XI, No. 1 September 2017
- [10] Darmawan, Deni. 2015. Faktor Komunikasi Kebijakan dalam Pengelolaan Pasar Tradisional suatu Studi di Kota Pontianak. *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*. Oktober 2015

- [11] Nurati, Dian Esti. 2016. Komunikasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berbasis pada Kearifan Lokal (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 01, 2016.
- [12] Sidauruk, Paraden Lucas. 2013. Peranan Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pusat Layanan Internet Kecamatan (Kasus Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, Vol. 3, No. 1 September 2013; 81-113
- [13] Bandur, Agustinus. 2019. *Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus*. Bogor: Mitra Wacana Media
- [14] Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS

LAMPIRAN

Instrumen Penelitian

Wawancara yang dilakukan termasuk jenis wawancara semi terstruktur. Jadi peneliti mengembangkan pertanyaan wawancara saat penggalian data di lapangan. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang disampaikan saat wawancara.

1. Proses produksi berita (tahapan mulai dari menentukan berita hingga rilis, koordinasi yang dilakukan berapa penulis yang terlibat)
2. Ketentuan-ketentuan dalam penyusunan berita misalnya berkaitan dengan konten, topik, waktu rilis berita, kuantitas rilis berita, penggunaan bahasa dan lain-lain
3. Isi berita di portal berita Pemkot Surabaya apakah juga disebarkan di portal berita lain atau di media social
4. Isi berita di portal berita Pemkot Surabaya apakah juga merupakan tanggapan dari berita di portal berita lain dan media social resmi pemkot
5. Opini wartawan terhadap kebijakan PSBB

Peneliti melakukan tabulasi data atas artikel berita yang dirilis selama masa PSBB Kota Surabaya periode pertama. Berikut beberapa tabel yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan tabulasi data.

Hari ke-	Tanggal Berita	Jumlah Artikel	Hari ke-	Tanggal Berita	Jumlah Artikel

No	Bentuk Kegiatan dalam PSBB	Jumlah Artikel	Judul Artikel

No	Judul	Skema	Latar dan Pra-anggapan	Detil	Maksud dan Koherensi (pertalian antar kata atau kalimat atau fakta)	Leksikon (pilihan kata) dan Metafora (ungkapan, pepatah, peribahasa atau dalil)

Personalia Tenaga Peneliti beserta Kualifikasinya

1. Ketua Peneliti

- a Nama Lengkap : Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP.
- b NIDN : 0029048701
- c Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I/IIIb
- d Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- e Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum
- f Bidang Keahlian : Kebijakan Publik

2. Anggota Peneliti I

- a Nama Lengkap : Dr. Tjitjik Rahaju, S.Sos. M.Si
- b NIDN : 0028047101
- c Pangkat/Golongan : /IIId
- d Jabatan Fungsional : Lektor
- e Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum
- f Bidang Keahlian : Kebijakan Publik

3. Anggota Peneliti II

- a Nama Lengkap : Dra. Meirinawati, M.AP.
- b NIDN : 0021056804
- c Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
- d Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum
- f Bidang Keahlian : Manajemen Publik

4. Anggota Peneliti III

- a Nama Lengkap : Indah Prabawati, S.Sos, M.Si
- b NIDN : 0029077404
- c Pangkat/Golongan : Penata Tk I/IIId
- d Jabatan Fungsional : Lektor
- e Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum
- f Bidang Keahlian : Kebijakan Publik

5. Anggota Peneliti IV

- a Nama Lengkap : Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.
- b NIDN : 0020049001
- c Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I/IIIb
- d Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- e Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum
- f Bidang Keahlian : Pemerintahan Daerah

Critical Discourse Analysis on News Articles regarding Large-scale Social Restriction Policy in Surabaya Government Official Website, East Java, Indonesia

Badrudin Kurniawan, Tjitjik Rahaju, Meirinawati, Indah Prabawati, Galih Wahyu Pradana
Department of Public Administration, Faculty of Social Science and Law, Universitas Negeri Surabaya
Email Address: badrudinkurniawan@unesa.ac.id

Abstract

Large-scale Social Restrictions (LSR) are one of the policies of the Indonesian government in breaking the chain of spreading Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). This policy is implemented at the provincial and district/city scales. One of local government that has implemented this policy is Surabaya Government. A news page belonging to the government reported that Surabaya Government had complied with what the provincial government instructed, namely implementing the LSR. The government reporting is a form of persuasive policy communication. Communication through online media is able to build public opinion. In the initial LSR reporting, there was no news about LSR monitoring in industrial estates. The purpose of this study is to analyze critically discourse on the news of LSR policies on the online portal of the Surabaya City Government. The data collected by researchers are primary and secondary data. The results of this study indicate that LSR news tends to be done to build a good image of the government only. However, this tends to ignore more comprehensive coverage. The government has also been too careful about releasing news about Covid-19 when it comes to industries.

Keywords: *Corona Virus Disease 2019, Large-scale Social Restrictions, Policy Communication, Government Official Website, Critical Discourse Analysis*

Introduction

Asia has the most preventive and secured response to the corona virus by border controls, wearing of the face masks and making it as a routine in early January 2020 (Comite, 2020). One of the policies implemented by the Indonesian Government in dealing with the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic is Large-Scale Social Restrictions (LSR). Before this policy was implemented by local government, first they should propose LSR plan to the Minister of Health. The Surabaya City Government, with the highest number of infected residents in East Java Province, has also submitted and received approval for LSR's implementation. Previously, many mass media discussed the attitude of Major of Surabaya Government, Tri Rismaharini, which did not immediately apply for the LSR even though this city had the highest number of Covid-19 cases in East Java Province. Media coverage sets the agenda for public debate (Wahab, Siang, Cahyowati, Wahab, & Ph, 2020). Here are some online news related to this.

1. April 10th, 2020: The title "Instead of PSBB in Surabaya, This is Risma's Kick Against Covid-19". In this news article, the Mayor of Surabaya, Tri Rismaharini, said that the LSR or regional quarantine had actually made a mess. According to her, the most important thing is discipline to keep your distance, wear a mask, and always maintain cleanliness (Rohmat, 2020).
2. April 14th, 2020: Title "Regional People's Representative Assembly Asks Surabaya City Government to Immediately Implement LSR". In this news article, Ibnu Shobir, a member of Commission D said that the Surabaya City Government should immediately enforce the LSR

because the number of positive cases of Covid-19 continues to increase. There needs to be assistance for both Low-Income Communities and those not included in that category (anonim, 2020a).

3. April 21st, 2020: Title "Regional People's Representative Assembly DPRD Doubts the Capacity of the Local Budget for the Implementation of LSR in Surabaya". In this news article, the Deputy Chairman of the Surabaya City DPRD from the Gerindra Faction A.H. Thony, questioned the adequacy of the budget for the provision of basic foodstuffs for non-low income people (MBR). Previously, Pemkor set a budget allocation for MBR of Rp. 161 billion (Mubyarsah, 2020).

However, the news on the official website of Surabaya Government, namely <https://surabaya.go.id/id/berita>, dated April 19, 2020, stated that Tri Rismaharini followed the governor's decision (anonim, 2020b). After enacting the Mayor of Surabaya Regulation Number 16 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in Handling Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) in the City of Surabaya, the news page reviews various city government activities in preparation for the implementation of the LSR. The policy will be held from 28 April 2020 to 11 May 2020 (anonim, 2020b).

From several news released on the <https://surabaya.go.id/id/berita> page, there are no reviews about the preparation of assistance to overseas residents and direct monitoring of industries in Surabaya. Whereas previously it was reported that 4,242 workers in public entertainment houses were laid off. Previously, the coordination meeting between Commission D and the Surabaya Manpower Agency said that only eight companies reported having laid off 685 employees (surabaya.liputan6.com). Monitoring of the industries in Surabaya City is also important to ensure their compliance with the LSR policy. According to data from the Surabaya City Central Statistics Agency, in 2014 there were 816 medium and large industries with a total workforce of 108,803 people. Therefore the researcher is interested in conducting a research entitled Critical Discourse Analysis on News Articles regarding Large-scale Social Restriction Policy in Surabaya Government Official Website.

Theoretical Framework

There has been a lot of research on policy communication in Indonesia. This study discusses a lot about the indicators of success presented by Edward III (Lucas Sidauruk, 2014; Darmawan, Armawan, & Haryaningsih, 2015; Nurati, 2016; Khoirul Syani, Mufid, & Hazin, 2018). Forms of communication with good transmission, clarity and consistency of information also need to be supported by the social conditions of the community. Forms of communication based on the social conditions of the community will realize the success of policy communication.

In the era of the Industrial Revolution 4.0, policy communication carried out by the government was also conducted online. Both the central and local governments have official websites that contain a lot of information. One of the contents on the official page is the reporting of policies carried out by the government. This reporting is also a form of policy communication that has a persuasive nature because it can influence public opinion. In line with what Anderson said in Sidauruk saying that mass communication media may play an important role in shaping public opinion toward an agency by revealing and publicizing its actions, favorably or unfavorably (Lucas Sidauruk, 2014).

Policy communication studies, especially policy reporting through official government websites, are necessary. The government is able to build public opinion according to their interests. Therefore it is necessary to have a critical attitude to analyze the reporting of policies carried out by the government. In this case, the Critical Discourse Analysis approach is important to be adopted in analyzing policy reporting. By using this approach, researchers are able to uncover government interests through the text and context of online policy reporting.

Research Methods

In Eriyanto's book (Eriyanto, 2001) entitled *Discourse Analysis: Introduction to Media Text Analysis*, van Dijk's critical discourse analysis framework is described. CDA is suitable for research into social and cultural changes because it facilitates the integration of discourse analysis and the analysis of macro contexts (Li, Pearce, & Low, 2018). Within this framework, there are at least three important aspects that are interrelated in shaping the meaning of discourse in online reporting of the implementation of the LSR policy by the Surabaya City Government. These three aspects include text, social cognition and social analysis. These three aspects form the basis for determining the focus of critical discourse analysis. The following are the focus of this research:

1. Discourse and textual strategies are used to describe the implementation of the LSR policy in Surabaya City
2. Cognition of journalists for the <https://surabaya.go.id/id/berita> page in understanding the implementation of LSR policies in the City of Surabaya
3. The discourse on implementing the LSR policy is developing in the community of Surabaya City.

The data collected by researchers are primary and secondary data. Primary data is the result of interviews with the Surabaya City Government's online portal journalists. Secondary data is in the form of online news from the Surabaya City Government and other news pages as well as comments from residents about the implementation of LSR which are recorded in the official social media of the Surabaya City Government. The secondary data in question were obtained from the period from 28 April 2020 to 11 May 2020. These data were then analyzed. Text analysis is done by identifying the structure of the text in a news article. The results of the interviews were analyzed to find out how the journalists viewed this issue. Furthermore, residents' comments on social media are analyzed to determine the discourse that is developing in society.

Results And Discussion

Text Analysis

Discourse analysis cannot be thought without text analysis which is the micro aspects of discourse practice (Atalik, Eylul, & Kocak, 2015). The number of reports published from the period 28 April 2020 to 12 May 2020 with the theme LSR was 37 articles. The most articles were published on April 28, 2020 with 5 articles published on that day, the remaining 2 or 3 articles were published regularly in a period of 15 days from 28 April 2020 to 12 May 2020. From a number of articles, it can be categorized as there are 6 themes including the first theme of testing, tracing and treatment, the second theme, namely assistance for basic needs to the community, the third theme regarding incentives for business actors, the fourth theme regarding monitoring and evaluation, the fifth theme regarding others related to Covid-19 but not related to LSR policy, and the sixth theme, the last one is about others that are not related to the LSR and Covid-19.

The results of the analysis show that the city government is described as a professional, hard-working, firm and obedient party to the regulations in overcoming the Covid-19 pandemic. This imaging is done by using several elements in the news text, namely pre-assumptions and the background used by journalists to guide the direction of the narrative being made. In addition, the lexicon or choice of words is also used to support this image. For example choice of words such as epidemiological investigations, massive swab tests, taking pains, coming down to resuscitate, mass rapid tests, empowering, collaboration, verbal reprimands, written reprimands, continuing to evaluate, massive plunging, zealously giving sanctions, incessant continue to control and others. In some articles usually also use elements of coherence and intent to emphasize government actions.

News Writer's Cognition Analysis

News writers view the LSR policy as one way of dealing with the Covid-19 Pandemic. The policy is considered not only a health issue but also an economic issue. The policy is one of the strategies to break the chain of spreading Covid-19. On the other hand, it also has an impact on the economic activities of the community. The existence of this policy will have an effect on slowing down or even stopping activities for certain sectors. The impact is economic losses suffered by some of these sectors. The policy is deemed not to balance the two issues. Economic issues received less attention in implementing the LSR policy. The development and implementation of different Covid-19 protocols for specific sectors is seen as a balance between health and economic issues.

Regarding news about LSR implementation monitoring. The news tends to covering on traditional market or public facility monitoring. The monitoring of industries has received less attention. Industries, especially large industries, are considered to have consciously implemented Covid-19 protocols. However, the online news from official Surabaya Government on May 2, 2020, covered one of the large industries in the City of Surabaya has dozens of employees who have been confirmed positive for Covid-19. They can be infected by various way. The employee could be infected elsewhere. However, the number of employees who are positive for Covid-19 is quite a lot, so it is rational that news regarding of industry surveillance should be included in the news setting agenda. However, the Public Relations of the Surabaya City Government had conveyed that the reporting of industrial supervision was not profitable. In addition, reporting on industrial supervision was not carried out because many industries were closed during the LSR period.

Social Context

The discourse that is developing in the community of Surabaya City regarding LSR can be identified through their responses to the official social media account posts of the city government. This response can be in the form of "like" or "comment". Although the researchers conducted research on the news of LSR policies on city government official website, the responses of the people studied were on official social media accounts. This is because there is no comment column on the official website.

The Surabaya City Government has four official accounts on several types of social media, namely Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. The official account name is "Bangga Surabaya". Of the various types of social media, the most followers are official accounts on Instagram, namely 279k (thousands) of followers. Then the official account on Facebook has 147,122 followers, Twitter with 100k followers and Youtube with 24.2k subscribers. Based on this, the researcher focused on the analysis of the public's response to the official Instagram social media account. Researchers assess that the public's response to the official Instagram account is quite representative of the discourse that is developing in society. There were 8 posts on Instagram during the first period of LSR.

The researcher examines the comments that get the most "likes". Based on the comments of the 8 posts, it is known that there are at least two things that are the main concern of the community, namely, first, compliance with the Covid-19 protocol and community support for the city government. Public attention to violations of the Covid-19 protocol, namely crowds in certain locations, such as streets, places of worship and coffee shops. Based on these comments, there is no concern for industries compliance with the Covid-19 protocol. Apart from that, the existing comments also tend to be a form of appreciation and support for the city government, especially posts on the mayor's activities. Several posts did tell about the mayor's activities to face the Covid-19 pandemic.

Conclusions And Recommendations

This study aims to do analyze critical discourse of the LSR policy reporting on the online portal of the Surabaya City Government. The results showed that the government used a textual strategy to

show that the Surabaya City Government worked hard and professionally in overcoming the Covid-19 Pandemic during the first LSR period. Although it was also found that there were important elements of the LSR that did not get an adequate portion of coverage namely the local government supervision of Covid-19 protocol implementation by industries. Journalists consider the news to be less profitable for the city government. Even though the surveillance reports also show that the government ensures the Covid-19 protocol as long as the LSR can be implemented properly. In addition, through the city's official social media accounts, residents also paid attention to violations of the Covid-19 protocol committed by the community in several areas in Surabaya. This indicates that LSR reporting tends to be done to build a good image of the government only. However, this tends to ignore more comprehensive coverage. The government has also been too careful about releasing news about Covid-19 when it comes to industries.

Based on the results, several aspects of online reporting need to be improved. First, a news portal should provide an opportunity to create two-way communication between the government and the public. The Public Relation Department needs to add a comment column on the city government news portal. Second, image branding is also important to build public trust. However, education to the public regarding certain public policies has not been carried out optimally. There are still plenty of opportunities to do this.

References

- anonim. (2020a). Jokowi Umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia. Retrieved April 26, 2020, from [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia) website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia>
- anonim. (2020b). Wali Kota Risma “Manut” Keputusan Gubernur Soal PSBB. Retrieved April 26, 2020, from surabaya.go.id website: <https://surabaya.go.id/id/berita/54482/wali-kota-risma-manut-keputus>
- Atalik, O., Eylul, I., & Kocak, B. B. (2015). Discourse Analysis for Ads in Turkey: Pegasus Airlines and Anadolujet. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 5(6), 87–101. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v5-i6/1659>
- Comite, U. (2020). The Impact on Businesses and Public Health Using Lock Down as a Tool against Covid-19 Pandemic in Italy: A Global Perspective. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(5), 394–405. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i5/7210>
- Darmawan, D., Armawan, S., & Haryaningsih, S. (2015). FAKTOR KOMUNIKASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL Suatu Studi Di Kota Pontianak. *JURNAL ILMIAH ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA*, S-102. Retrieved from <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpmis/article/view/11710>
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: pengantar analisis teks media* (1st ed.). Retrieved from https://books.google.co.id/books/about/Analisis_wacana.html?hl=id&id=cpDAPMAmimcC
- Khoirul Syani, A., Mufid, S., & Hazin, M. (2018). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. *Khazanah Pendidikan*, 11(1), 25–38. <https://doi.org/10.30595/jkp.v11i1.2309>
- Li, J., Pearce, P. L., & Low, D. (2018). Media representation of digital-free tourism: A critical discourse analysis. *Tourism Management*, 69(June), 317–329. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.06.027>
- Lucas Sidauruk, P. (2014). Peranan Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pusat Layanan Internet Kecamatan (Kasus Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*.
- Mubyarsah, L. R. (2020). DPRD Ragu dengan Kekuatan Anggaran untuk Penerapan PSBB di Surabaya. Retrieved April 26, 2020, from jawapos.com website: <https://www.jawapos.com/surabaya/21/04/2020/dprd-ragu-dengan-kekuatan-anggaran-untuk->

penerapan-psbb-di-surabaya/

Nurati, D. E. (2016). KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(01), 93–106. <https://doi.org/10.30996/jpap.v2i01.701>

Rohmat, H. (2020). Ketimbang PSBB di Surabaya, Ini Jurus Risma Tangkal Covid-19. Retrieved April 10, 2020, from [Gatra.com](https://www.gatra.com/detail/news/475135/kesehatan/ketimbang-psbb-di-surabaya-ini-jurus-risma-tangkal-covid-19) website: <https://www.gatra.com/detail/news/475135/kesehatan/ketimbang-psbb-di-surabaya-ini-jurus-risma-tangkal-covid-19>

Wahab, J. A., Siang, T. G., Cahyowati, T. D., Wahab, J. A., & Ph, D. (2020). *Media Framing on Covid-19 Pandemic in Malaysian and Indonesian Newspapers Media Framing on Covid-19 Pandemic in Malaysian and Indonesian Newspapers*. 1(10), 800–812. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v10-i10/8016>